

**Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Tingkat Kemiskinan Melalui
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Provinsi Jambi Tahun 2017-2021**



SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana
(S1) pada Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari**

OLEH:

NAMA: SITI MAISAROH

NIM: 1800860201018

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS BATANGHARI
KOTA JAMBI**

2023

TANDA PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Dengan ini komisi Pembimbing Skripsi menyatakan bahwa skripsi sebagai berikut:

NAMA : SITI MAISAROH
NIM : 1800860201018
PROGRAM STUDI : Ekonomi Pembangunan
JUDUL : Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Tingkat Kemiskinan Melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jambi Tahun 2017-2021

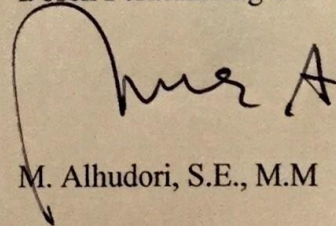
Telah memenuhi persyaratan dan layak untuk diuji pada ujian skripsi dan komprehensif sesuai dengan prosedur yang berlaku pada Program Studi Manajemen Fakultas ekonomi Universitas Batanghari Jambi.

Dosen Pembimbing I



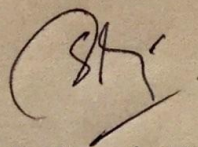
Dr. Evi Adriani, S.E., M.Si

Dosen Pembimbing II



M. Alhudori, S.E., M.M

Diketahui Oleh
Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan



Hj. Susilawati, S.E., M.Si

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif dan Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari Jambi pada:

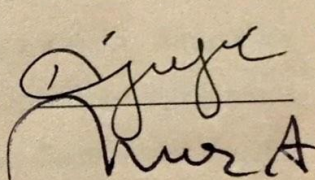
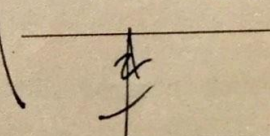
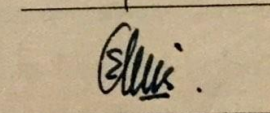
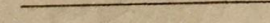
Hari : Jum'at

Tanggal : 17 Februari 2023

Jam : 08.00 – 10.00

Tempat : Ruang Sidang Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari

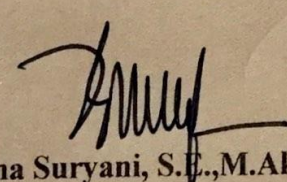
PANITIA PENGUJI

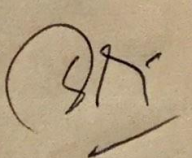
NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Dr. H. Saiyid Syekh, M.Si	Ketua	
M. Alhudori, S.E., M.M	Sekretaris	
Dr. Sudirman, S.E., M.E.I	Penguji Utama	
Dr. Evi Adriani, S.E., M.Si	Anggota	

Disahkan Oleh:

**Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Batanghari**

**Ketua Program Studi
Ekonomi Pembangunan**


Dr. Hj. Arna Suryani, S.E., M.Ak., Ak., CA.CMA


Hj. Susilawati, S.E., M.Si.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Maisaroh
NIM : 1800860201018
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Dosen Pembimbing : Dr. Evi Adriani, S.E., M.Si.
M. Alhudori, S.E., M.M.
Judul Skripsi : Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Tingkat Kemiskinan Melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jambi Tahun 2017-2021

Menyatakan bahwa dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya sendiri. Saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasi sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Batanghari Jambi.

Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Unbari. Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Jambi, Februari 2023

Yang membuat pernyataan,



SITI MAISAROH

NIM. 1800860201018

HALAMAN PERSEMBAHAN

Yang utama dari segalanya.....

Sembah, sujud dan syukur kepada Allah SWT.

Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikan kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta keridoan yang engkau berikan akhirnya Skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan.

Sholawat dan salam terlimpahkan keribaan Rosulullah Muhammad SAW.

Kupersembahkan karya ini kepada orang yang sangat kucintai dan kusayangi....

Ayahanda dan ibunda tercinta

Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terimakasih yang tak terhingga kupersembahkan untuk ayahanda M.saman dan ibunda Jamilah yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, do'a dan cinta kasih yang tiada terhingga, yang tiada mungkin untuk di balas, kakak ku Rita amaliyah dan Lia hamdiani, dan adekku Akifah ramadhani dan abang ipar Ahmad sahrul dan Ebi febriansyah dan keluarga besar saya mengucapkan terimakasih banyak untuk semangat dan harapan penuh kekuatan yang kalian berikan. Dan berterima kasih juga kepada kekasihku abang ilham partner yang selalu menemani dan mensupport Maisa sampai saat ini.

Hanya ucapan terimakasih yang tulus dan ikhlas sebesar besarnya kepada semua teman dan sahabat yg tak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan pengalaman semangat canda dan tawa. Teman-teman Ekonomi Pembangunan angkatan 2018 yang selalu berbagi ilmu yang bermanfaat, support,serta canda tawa.

ABSTRAK

(SITI MAISAROH / 1800860201018 / PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN MELALUI INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DI PROVINSI JAMBI TAHUN 2017-2021 / PEMBIMBING I Dr. EVI ADRIANI, S.E., M.Si / PEMBIMBING II M. ALHUDORI, S.E., M.M)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan bidang kesehatan secara simultan terhadap tingkat kemiskinan melalui Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jambi. (2) Pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan bidang kesehatan secara parsial terhadap tingkat kemiskinan melalui Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jambi. (3) Pengaruh pengeluaran pemerintah bidang Pendidikan, bidang Kesehatan dan Indeks Pembangunan Manusia secara simultan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi. (4) Pengaruh pengeluaran pemerintah bidang Pendidikan, bidang Kesehatan dan Indeks Pembangunan Manusia secara parsial terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Uji prasyarat analisis data menggunakan uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan berpengaruh dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jambi. Sedangkan variabel pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jambi. Pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan dan bidang kesehatan berpengaruh dan signifikan secara simultan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jambi. (2) Pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan, pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan dan indeks pembangunan manusia tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi. Pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan, bidang kesehatan dan indeks pembangunan manusia berpengaruh dan signifikan secara simultan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi.

Kata Kunci : Pengeluaran Pemerintah, Tingkat Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia

ABSTRACT

(SITI MAISAROH / 1800860201018 / THE INFLUENCE OF GOVERNMENT EXPENDITURES ON POVERTY LEVELS THROUGH THE HUMAN DEVELOPMENT INDEX (IPM) IN JAMBI PROVINCE IN 2017-2021/ PEMBIMBING I Dr. EVI ADRIANI, SE, M.SI / PEMBIMBING II M. ALHUDORI, S.E., M.M)

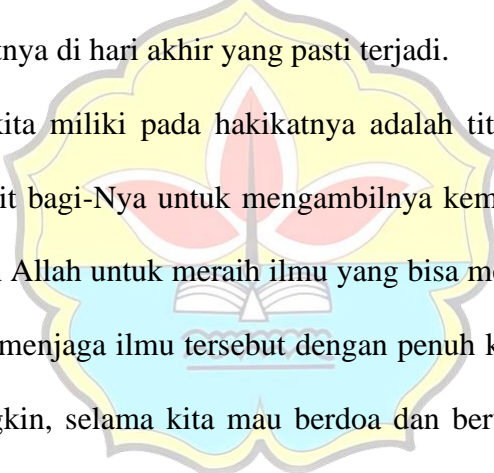
This study aims to determine: (1) The effect of government spending on education and health simultaneously on poverty levels through the Human Development Index in Jambi Province. (2) The partial effect of government spending on education and the health sector on the poverty rate through the Human Development Index in Jambi Province. (3) The effect of government spending on Education, Health and Human Development Index simultaneously on the poverty rate in Jambi Province. (4) The partial effect of government spending on Education, Health and Human Development Index on the poverty rate in Jambi Province. The research method used in this research is descriptive and quantitative method. The type of data used is secondary data, obtained from the Central Bureau of Statistics and the Directorate General of Fiscal Balance. This study uses simple linear regression analysis and multiple linear regression. Data analysis prerequisite test used normality test, multicollinearity test, and heteroscedasticity test. The results of the study show that (1) government spending on education has a significant and significant effect on the Human Development Index in Jambi Province. Meanwhile, the variable of government expenditure in the health sector has no effect on the Human Development Index in Jambi Province. Government spending on the education and health sectors has a simultaneous and significant effect on the Human Development Index in Jambi Province. (2) Government spending on education has no effect on the poverty rate, government spending on health has an effect on the poverty level and the human development index has no effect on the poverty rate in Jambi Province. Government spending on education, health and the human development index has a significant and simultaneous effect on the poverty rate in Jambi Province.

Keyword : *Government Spending, Poverty Rate, Human Development Index*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT, Rabb semesta alam yang telah memberikan kita kesempatan hidup di dunia ini dan memberikan nafas yang dengannya kita dapat merasakan keindahan untuk bisa menyembah-Mu. Sungguh tidak ada satupun kejadian yang terjadi secara kebetulan, semua sudah terencana, semua telah ditentukan oleh qadha dan qodar-Nya. sholawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, Baginda nabi Muhammad SAW semoga kelak kita mendapat syafaatnya di hari akhir yang pasti terjadi.



Ilmu yang kita miliki pada hakikatnya adalah titipan dari Allah, yang sama sekali tidak sulit bagi-Nya untuk mengambilnya kembali dari kita. semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk meraih ilmu yang bisa menjadi penerang dalam kegelapan dan dapat menjaga ilmu tersebut dengan penuh kerendahan hati. Tidak ada yang tidak mungkin, selama kita mau berdoa dan berusaha, seperti pepatah bahasa Arab "*Man Jadda Wa Jadda*" yang artinya barangsiapa yang bersungguh-sungguh akan mendapatkannya. Urusan kita dalam kehidupan ini bukanlah untuk mendahului orang lain, tapi untuk melampaui diri kita sendiri, untuk memecahkan rekor diri sendiri dan untuk melampaui hari kemarin dengan hari yang lebih baik. Itulah sepenggal kalimat yang menjadi penggugah demi terselesaikannya skripsi yang sederhana ini, yang berjudul **"Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Tingkat Kemiskinan Melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jambi Tahun 2017-2021"**

Dengan selesainya skripsi ini, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Prof.Dr.Herri,SE,M.B.A selaku PJ Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Ibu Dr. Arna Suryani, SE, M.AK, AK, CA.CMA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Univertas Batanghari Jambi.
3. Ibu Hj.Susilawati, SE,M.Si selaku Kaprodi Ekonomi Pembangunan Universitas Batanghari Jambi.
4. Pak Muhammad Amali, SE, MSi selaku pembimbing Akademik dan sudah memberikan banyak arahan selama 8 semester ini.
5. Ibu Dr. Evi Adriani, SE, M.Si selaku pembimbing I Tugas Akhir Skripsi dan yang selalu mendukung dan memberi saran selama masa perkuliahan hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Bapak M. Alhudori, SE, M.M selaku pembimbing II Tugas Akhir Skripsi dan yang selalu memberi saran dan membantu dalam proses penulisan skripsi.
7. Seluruh dosen program studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari Jambi, berkat jasa bapak dan ibu dosen selama masa kuliah serta saran dan masukan yang diberikan hingga skripsi ini menjadi lebih baik.
8. Kedua orang tua penulis, Ayah (M.Saman) dan ibu (Jamilah) yang telah memberikan dukungan materiil dan moril.

9. Sodara kandung mokyu Rita Amaliyah Mokning Lia Hamdiani Adek Akifa Ramadhani yang telah mendukung dan memberikan dukungan support tiada hentinya hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
10. Kepada kekasihku bang ilham yang telah menemani di setiap keluh kesah dan selalu memberikan dukungan doa serta semangat selama dalam proses penyusunan skripsi ini.
11. Kepada sahabatku Nurdilla utari, Siti mawaddah, Siti rahmah, Nurul hikmah, Nurul huda safitri yang selalu memberikan dukungan dan selalu mendoakan selama proses penyusunan skripsi ini.
12. Kepada semua teman-teman yang terlibat dan selalu memberikan semangat, dukungan dan doa dalam proses penyusunan skripsi ini.
13. Kepada teman-teman seperjuangan Ekonomi Pembangunan angkatan 2018, yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu. Terimakasih atas waktu, canda, tawa, senyum, pengalaman baru selama ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jambi, 17 Februari 2023

SITI MAISAROH
NIM : 1800860201018

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
TANDA PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	ii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Identifikasi Masalah	7
1.3. Rumusan Masalah	7
1.4. Tujuan Penelitian	8
1.5. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN METODE PENELITIAN	
2.1. Tinjauan Pustaka	10
2.1.1. Landasan Teori.....	10
2.1.1.1 Pengeluaran Pemerintah.....	10
A. Definisi Pengeluaran Pemerintah	10
B. Teori Pengeluaran Pemerintah	13
C. Hubungan Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia	16
D. Hubungan Pengeluaran Pemerintah di Bidang Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia	18
2.1.1.2 Kemiskinan	19
A. Ukuran Kemiskinan	20
B. Penyebab Kemiskinan.....	22
C. Teori Kemiskinan.....	22
2.1.1.3 Indeks Pembangunan Manusia.....	23

2.1.2	Penelitian Terdahulu	27
2.1.3	Kerangka Berpikir	28
2.1.4	Hipotesis Penelitian.....	32
2.2	Metode Penelitian.....	33
2.2.1	Metode Penelitian yang Digunakan	33
2.2.2	Jenis dan Sumber Data	33
2.2.3	Teknik dan Pengumpulan Data	34
2.2.4	Operasionalisasi Variabel Penelitian.....	34
2.2.5	Teknik Analisis Data	35
BAB III GAMBARAN OBJEK PENELITIAN		
3.1	Kondisi Geografis	41
3.2	Kondisi Kependudukan.....	44
3.3	Gambaran Tingkat Kemiskinan Provinsi Jambi	47
3.4	Gambaran Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Provinsi Jambi.....	48
3.5	Gambaran Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Provinsi Jambi.....	49
3.6	Gambar Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jambi.....	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
4.1	Hasil Penelitian	52
4.1.1	Permodelan Sub Struktural I.....	52
4.1.1.1	Uji Spesifikasi Model	52
4.1.1.2	Hasil Uji Asumsi Klasik	55
4.1.1.3	Pengujian Hipotesis	58
4.1.2	Permodelan Sub Struktural II.....	60
4.1.2.1	Uji Spesifikasi Model.....	61
4.1.2.2	Hasil Uji Asumsi Klasik.....	64
4.1.2.3	Pengujian Hipotesis.....	67
4.2	Analisis dan Pembahasan	70
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		
5.1	Kesimpulan	76
5.2	Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA		78
LAMPIRAN.....		82

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan di Provinsi Jambi Periode 2017-2021	4
Tabel 1.2 Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan di Provinsi Jambi Periode 2017-2021	4
Tabel 1.3 Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jambi Periode 2017-2021	5
Tabel 1.4 Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jambi Periode 2017-2021	6
Tabel 3.1 Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi	43
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Provinsi Jambi	44
Tabel 3.3 Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jambi Periode 2017-2021	47
Tabel 3.4 Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan di Provinsi Jambi Periode 2017-2021	49
Tabel 3.5 Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan di Provinsi Jambi Periode 2017-2021	50
Tabel 3.6 Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jambi Periode 2017-2021	50
Tabel 4.1 Hasil Uji Chow	53
Tabel 4.2 Hasil Uji Hausman	54
Tabel 4.3 Hasil Analisis Regresi Data Panel	54
Tabel 4.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas	56
Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinearitas	57
Tabel 4.6 Hasil Uji Autokorelasi	58
Tabel 4.7 Hasil Uji F	58
Tabel 4.8 Hasil Uji t	59
Tabel 4.9 Hasil Koefisien Determinasi	60

Tabel 4.10 Hasil Uji Chow.....	62
Tabel 4.11 Hasil Uji Hausman.....	62
Tabel 4.12 Hasil Analisis Regresi Data Panel	63
Tabel 4.13 Hasil Uji Heteroskedastisitas	65
Tabel 4.14 Hasil Uji Multikolinearitas.....	66
Tabel 4.15 Hasil Uji Autokorelasi	67
Tabel 4.16 Hasil Uji F.....	67
Tabel 4.17 Hasil Uji t.....	68
Tabel 4.18 Hasil Koefisien Determinasi	69



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pemikiran.....	32
Gambar 2.2 Sub Struktural I	36
Gambar 2.3 Sub Struktural II	37
Gambar 3.1 Persentase Jumlah Penduduk di Provinsi Jambi	46
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas.....	56
Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas.....	65



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Mentah Penelitian	82
Lampiran 2. Data Hasil Penelitian	84



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan merupakan prasyarat mutlak bagi kelangsungan hidup suatu bangsa. Pencapaian pembangunan berkelanjutan merupakan bagian penting yang harus dilakukan negara untuk menciptakan kondisi di mana masyarakat dapat berumur panjang, hidup sehat dan menikmati lingkungan yang mendukung kehidupan yang produktif. Pengembangan sumber daya manusia melibatkan peningkatan keterampilan dasar penduduk. Ini meningkatkan peluang Anda untuk terlibat dalam proses pengembangan (Christina, 2011).

Pada hakekatnya pembangunan adalah pembangunan manusia, sehingga perlu diprioritaskan alokasi belanja untuk keperluan ini dalam penyusunan anggaran (Adi, 2007). Memprioritaskan belanja pembangunan manusia juga dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan sosial. Peningkatan pembangunan manusia dapat dilihat dari skala Indeks Pembangunan Manusia. Seiring dengan naiknya Indeks Pembangunan Manusia, tingkat bantuan sosial juga akan meningkat. Jika tingkat bantuan sosial meningkat, maka jumlah penduduk miskin akan berkurang baik secara kuantitatif maupun kualitatif (Widodo, 2011).

Pencapaian pembangunan manusia di suatu negara memerlukan tiga dimensi pembangunan manusia: umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak, yang dapat digambarkan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pembangunan manusia merupakan salah satu indikator

kemajuan suatu negara, dan pembangunan suatu negara tidak dapat dikatakan berhasil jika hanya diukur dari besaran Produk Domestik Bruto (PDB) saja tanpa meningkatkan pembangunan manusia. Produk domestik bruto suatu negara yang tinggi seringkali tidak sesuai dengan tingkat perkembangan rakyatnya yang sama. Hal ini dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak mampu menghasilkan kesejahteraan masyarakat akibat ketimpangan tingkat ekonomi masing-masing kelompok masyarakat (Christina, 2011).

Terdapat empat komponen data yang dapat menggambarkan Indeks Pembangunan Manusia yaitu angka harapan hidup untuk mengukur keberhasilan kesehatan, angka melek huruf dan lama sekolah untuk mengukur keberhasilan pendidikan, daya beli masyarakat dalam hal jumlah kebutuhan dasar yang diukur dengan rata-rata pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan, ukuran keberhasilan Layak dalam bidang pembangunan untuk kehidupan (Badrudin, 2012).

Menghitung Indeks Pembangunan Manusia sebagai ukuran pembangunan manusia memiliki tujuan yang penting. Dengan kata lain, indeks majemuk yang membuat metrik yang mengukur aspek fundamental HDI, menggunakan metrik yang berbeda untuk membuat pengukuran tetap sederhana, dan sebagai gantinya menggunakan serangkaian indeks dasar. Indeks Pembangunan Manusia Global adalah ukuran standar yang dapat dibandingkan antar wilayah atau negara (BPS, 2019).

Secara teknis, Indeks Pembangunan Manusia merupakan gabungan dari empat indikator: harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama bersekolah, dan

pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Angka harapan hidup mengukur dimensi umur panjang dan hidup sehat, melek huruf dan sekolah mengukur dimensi pengetahuan, dan pengeluaran per kapita mengukur dimensi standar hidup yang layak. Pada tahun 2010, metode lama UNDP telah dimodifikasi atau diperbaiki dengan metode baru, seperti karena literasi tidak lagi efektif digunakan untuk mengukur dimensi pengetahuan karena angka literasi yang sudah tinggi di beberapa daerah. Ada beberapa alasan untuk mengubah metode yang digunakan (BPS,2019).

Selain itu, tingkat kemiskinan juga mempengaruhi IPM. Kemiskinan terjadi ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar atau minimum mereka untuk standar hidup tertentu. Kemiskinan dapat dipahami sebagai keadaan kekurangan uang atau barang untuk hidup. Salah satu kemiskinan menurut *Word bank* (2004) disebabkan kurangnya pendapatan dan aset untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan yang layak, sandang, perumahan, kesehatan dan pendidikan. Lebih lanjut, kemiskinan juga terkait dengan terbatasnya kesempatan kerja, dengan mereka yang tergolong miskin biasanya menganggur (*unemployed*) dan umumnya memiliki tingkat pendidikan dan kesehatan yang tidak memadai. Upaya penanggulangan kemiskinan juga tidak terlepas dari jumlah pengeluaran pemerintah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Berikut pengeluaran pemerintah Provinsi Jambi yang meliputi bidang pendidikan, dan bidang kesehatan untuk periode 2017-2021.

Tabel 1.1
Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan
di Provinsi Jambi Periode 2017-2021

Wilayah	Tahun (Milyar Rupiah)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Kerinci	217.50	209.17	294.58	336.90	345.51
Merangin	395.98	378.38	416.22	404.77	406.78
Sarolangun	311.75	313.87	362.50	374.39	386.41
Batanghari	324.61	320.00	348.05	365.23	367.12
Muaro Jambi	317.96	374.95	417.08	405.17	406.52
Tanjung Jabung Timur	300.08	303.85	305.10	306.06	308.15
Tanjung Jabung Barat	254.08	296.06	303.49	354.27	357.38
Tebo	277.22	289.64	304.48	316.42	324.26
Bungo	332.69	343.39	337.03	384.91	398.23
Kota Jambi	458.59	442.59	451.74	501.57	543.87
Kota Sungai Penuh	163.53	171.29	180.56	186.26	191.36
Provinsi Jambi	3353.99	3443.19	3720.83	3935.95	4035.59

Sumber : Kementerian Keuangan RI 2022 (<https://djpk.kemenkeu.go.id/>)

Jumlah pengeluaran bidang publik untuk bidang Pendidikan di wilayah kabupaten/kota Provinsi Jambi mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2017 sampai tahun 2021 jumlah pengeluaran bidang pendidikan meningkat. Adapun pengeluaran pemerintah di bidang Kesehatan dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 1.2
Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan
di Provinsi Jambi Periode 2017-2021

Wilayah	Tahun (Milyar Rupiah)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Kerinci	85.85	110.36	139.67	214.48	235.12
Merangin	168.26	192.36	217.12	235.07	247.23
Sarolangun	141.83	149.65	171.83	204.86	216.14
Batanghari	138.62	160.37	182.30	250.44	263.21
Muaro Jambi	140.89	150.95	175.86	223.91	235.53
Tanjung Jabung Timur	92.90	107.86	129.37	139.57	151.59
Tanjung Jabung Barat	125.58	176.56	205.66	230.55	242.94
Tebo	116.98	130.23	155.55	160.80	163.15
Bungo	221.91	227.53	261.15	279.84	281.15
Kota Jambi	236.38	278.72	300.31	328.29	329.57
Kota Sungai Penuh	56.46	69.89	84.96	112.59	114.58
Provinsi Jambi	1525.66	1754.48	2023.78	2380.4	2480.21

Sumber : Kementerian Keuangan RI 2022 (<https://djpk.kemenkeu.go.id/>)

Data jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi dapat dilihat dari tabel

berikut ini:

Tabel 1.3
Tingkat Kemiskinan
di Provinsi Jambi Periode 2017-2021

Wilayah	Tahun (Ribu Jiwa)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Kerinci	17.60	16.76	17.00	17.48	18.45
Merangin	35.48	33.95	32.88	33.92	35.44
Sarolangun	25.61	25.70	25.39	25.79	27.06
Batanghari	27.49	27.55	26.53	26.54	27.24
Muaro Jambi	18.28	17.38	16.86	17.30	20.49
Tanjung Jabung Timur	27.22	26.99	25.35	24.23	24.42
Tanjung Jabung Barat	36.33	36.28	35.12	34.78	36.10
Tebo	23.18	22.86	22.83	22.47	23.77
Bungo	20.81	21.11	20.87	22.07	23.64
Kota Jambi	52.08	50.61	48.95	50.44	54.23
Kota Sungai Penuh	2.46	2.48	2.55	2.78	3.03
Provinsi Jambi	286.55	281.69	274.32	277.80	293.86

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi 2022

Berdasarkan data kondisi kemiskinan di Provinsi Jambi diatas, terlihat bahwa tingkat kemiskinan di kabupaten/kota di provinsi jambi selama tahun 2017-2021 mengalami fluktuatif. Pada kabupaten Kerinci pada tahun 2017 tingkat kemiskinan sebesar 17.60 kemudian mengalami penurunan di tahun 2018 sebesar 16.76 dan mengalami peningkatan sebesar 17.00.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tidak secepat pertumbuhan ekonomi. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang rendah melemahkan produktivitas tenaga kerja penduduk. Peringkat Indeks Pembangunan Manusia Indonesia dikumpulkan dari total skor Indeks Pembangunan Manusia di tingkat provinsi Indonesia. Berikut merupakan Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Jambi.

Tabel 1.4
Indeks Pembangunan Manusia
di Provinsi Jambi Periode 2017-2021

Wilayah	Tahun (Persen)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Kerinci	70.03	70.59	70.95	71.21	71.45
Merangin	68.30	68.81	69.07	69.19	69.53
Sarolangun	69.03	69.41	69.72	69.86	70.25
Batanghari	68.92	69.33	69.67	69.84	70.11
Muaro Jambi	67.86	68.34	69.01	69.18	69.55
Tanjung Jabung Timur	62.61	63.32	63.92	64.43	64.91
Tanjung Jabung Barat	66.15	67.13	67.54	67.54	68.16
Tebo	68.16	68.67	69.02	69.14	69.35
Bungo	69.04	69.42	69.86	69.92	70.15
Kota Jambi	76.74	77.41	78.26	78.37	79.12
Kota Sungai Penuh	73.75	74.67	75.36	75.42	75.70
Provinsi Jambi	69.99	70.65	71.26	71.29	71.63

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi 2022

Provinsi Jambi termasuk Kota yang telah berkembang pesat dengan kemajuan pembangunan di Provinsi Jambi pada saat ini terutama pada Indeks Pembangunan Manusianya (IPM). Indeks Pembangunan yang terjadi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang baik. Hal tersebut berarti kinerja pemerintah di kabupaten/kota Provinsi Jambi menunjukkan peforma yang baik. Jadi Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jambi mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Berdasarkan uraian di atas dan dengan asumsi-asumsi teori yang ada maka, penulis tertarik membuat penelitian ini dengan judul "**Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Tingkat Kemiskinan Melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Provinsi Jambi Tahun 2017-2021**".

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dikemukakan dari penjabaran latar belakang yang telah disampaikan. Berikut beberapa identifikasi masalah yang didapatkan :

1. Pada tahun 2018, Kerinci, Merangin, dan Kota Jambi mengalami penurunan pengeluaran di bidang pendidikan. Penurunan pengeluaran ini diikuti dengan penurunan kualitas pendidikan di daerah tersebut.
2. Pada tahun 2020, Merangin dan Muaro Jambi mengalami penurunan pengeluaran di bidang pendidikan. Penurunan ini juga diikuti dengan penurunan kualitas pendidikan di daerah tersebut.
3. Pada tahun 2018, Sarolangun, Batanghari, Bungo dan Kota Sungai Penuh mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin.
4. Pada tahun 2019, Kerinci dan Kota Sungai Penuh mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin.
5. Pada tahun 2020 dan 2021, semua kabupaten/kota di Provinsi Jambi mengalami kenaikan penduduk miskin. Hal ini bisa terjadi karena adanya pandemi Covid-19 yang membuat masyarakat banyak kehilangan pekerjaan mereka.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat di ambil kesimpulan pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan bidang kesehatan secara simultan terhadap tingkat kemiskinan melalui Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jambi?

2. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan bidang kesehatan secara parsial terhadap tingkat kemiskinan melalui Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jambi?
3. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan bidang kesehatan secara simultan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi?
4. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan bidang kesehatan secara parsial terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan bidang kesehatan secara simultan terhadap tingkat kemiskinan melalui Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jambi.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan bidang kesehatan secara parsial terhadap tingkat kemiskinan melalui Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jambi.
3. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah bidang Pendidikan, bidang Kesehatan dan Indeks Pembangunan Manusia secara simultan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi.
4. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah bidang Pendidikan, bidang Kesehatan dan Indeks Pembangunan Manusia secara parsial terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi.

1.5 Manfaat Penelitian

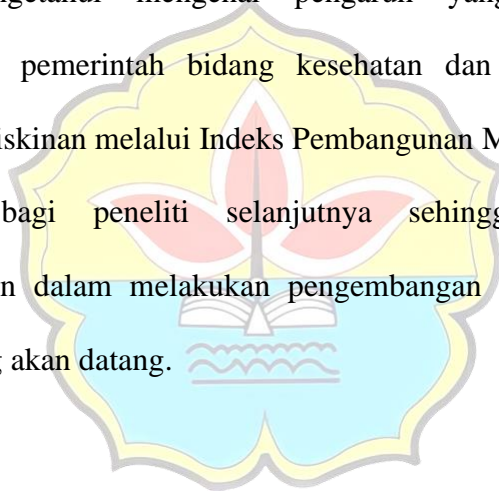
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

a. Manfaat Akademis

- 1) Dapat memperluas wawasan dan memberikan pengetahuan mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan bidang kesehatan terhadap tingkat kemiskinan melalui Indeks Pembangunan Manusia sehingga dapat berguna dimasa yang akan datang.

b. Manfaat Praktis

- 1) Dapat mengetahui mengenai pengaruh yang signifikan antara pengeluaran pemerintah bidang kesehatan dan pendidikan terhadap tingkat kemiskinan melalui Indeks Pembangunan Manusia.
- 2) Referensi bagi peneliti selanjutnya sehingga dapat dijadikan perbandingan dalam melakukan pengembangan penelitian yang sama dimasa yang akan datang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN METODE PENELITIAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Landasan Teori

2.1.1.1 Pengeluaran Pemerintah

A. Definisi Pengeluaran Pemerintah

Sebagian dari pengeluaran pemerintah adalah untuk membiayai administrasi pemerintahan dan sebagian lainnya adalah untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan. Beberapa bidang penting yang akan dibiayai pemerintah adalah membayar gaji pegawai-pegawai pemerintah, membiayai sistem pendidikan dan kesehatan rakyat, membiayai perbelanjaan untuk angkatan bersenjata, dan membiayai berbagai jenis infrastruktur yang penting artinya dalam pembangunan. Pembelanjaan-pembelanjaan tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi negara. (Sukirno, 2004)

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pengeluaran pemerintah Indonesia secara garis besar dikelompokkan ke dalam dua golongan yaitu :

1. Pengeluaran Rutin

Pengeluaran rutin adalah pengeluaran yang secara rutin dilakukan oleh

pemerintah setiap tahunnya dalam rangka penyelenggaraan dan pemeliharaan roda pemerintahan. Pengeluaran rutin terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, subsidi, pembayaran angsuran dan bunga utang negara, belanja pemeliharaan, dan belanja perjalanan.

1. Pengeluaran Pembangunan

Pengeluaran pembangunan adalah pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk pembangunan fisik dan non fisik dalam rangka menambah modal masyarakat.

Menurut Dumairy (1999) Pemerintah memiliki 4 peran yaitu :

- Peran alokatif, yakni peranan pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi yang ada agar pemanfaatannya bisa optimal dan mendukung efisiensi produksi.
- Peran distributif, yakni peranan pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya, kesempatan dan hasil-hasil ekonomi secara adil dan wajar
- Peran stabilitatif, yakni peranan pemerintah dalam memelihara stabilitas perekonomian dan memulihkannya jika berada dalam keadaan disequilibrium.
- Peran dinamisatif, yakni peranan pemerintah dalam menggerakkan proses pembangunan ekonomi agar lebih cepat tumbuh, berkembang dan maju.

Empat jenis utama dari pengeluaran publik dinegara maju antara lain: pendidikan, infrastruktur, jaminan sosial dan kesejahteraan, dan perawatan kesehatan. Empat bidang tersebut dipilih berdasarkan lima kriteria:

1. Mewakili komponen utama pengeluaran

2. Melibatkan peran pemerintah pusat maupun daerah
3. Memberikan pengaruh pada sejumlah besar rumah tangga atau masyarakat
4. Menunjukkan tantangan kebijakan yang penting
5. Bidang-bidang tersebut telah berada dalam agenda kebijakan publik selama dua dekade terakhir

Menurut Sukirno (2004) penentu-penentu pengeluaran pemerintah diantaranya :

1. Proyeksi jumlah pajak yang diterima

Dalam menyusun anggaran belanjanya pemerintah harus terlebih dahulu membuat proyeksi mengenai jumlah pajak yang akan diterimanya. Semakin banyak jumlah pajak yang dapat dikumpulkan, semakin banyak pula perbelanjaan pemerintah yang akan dilakukan.

2. Tujuan-tujuan ekonomi yang ingin dicapai

Beberapa tujuan penting dari kegiatan pemerintah adalah mengatasi masalah pengangguran, menghindari inflasi dan mempercepat pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. Untuk mengatasi pengangguran dan pertumbuhan ekonomi yang lambat, misalnya pemerintah perlu membiayai pembangunan infrastruktur dan mengembangkan pendidikan.

3. Pertimbangan politik dan keamanan

Kekacauan politik, perselisihan di antara berbagai golongan masyarakat dan daerah sering berlaku di berbagai negara di dunia. Keadaan seperti itu akan menyebabkan kenaikan perbelanjaan pemerintah yang sangat besar, terutama apabila operasi militer perlu dilakukan. Ancaman kestabilan dari negara luar juga dapat menimbulkan kenaikan yang besar dalam pengeluaran ketentaraan

dan akan memaksa pemerintah membelanjakan uang yang jauh lebih besar dari pendapatan pajak.

B. Teori Pengeluaran Pemerintah

a) Teori W.W Rostow dan Musgrave

Rostow dan Musgrave (Mangkoesebroto dalam Winarti, 2014: 32) menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi, antara lain; tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan sarana dan prasarana seperti pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan guna memacu pertumbuhan agar dapat lepas landas. Bersamaan dengan itu porsi investasi pihak swasta juga meningkat. Tetap besarnya peranan pemerintah adalah karena pada tahap ini banyak terjadi kegagalan pasar yang ditimbulkan oleh perkembangan ekonomi itu sendiri. Banyak terjadi kasus eksternalitas negatif, misalnya pencemaran lingkungan yang menuntut pemerintah untuk turun tangan mengatasinya.

Menurut Musgrave, proses pembangunan merupakan rasio investasi total terhadap pendapatan nasional semakin besar, tapi rasio investasi pemerintah terhadap pendapatan nasional akan mengecil. Sementara itu Rostow berpendapat bahwa pada tahap lanjut pembangunan terjadi peralihan aktivitas pemerintah, dari penyediaan prasarana ekonomi ke pengeluaran-pengeluaran untuk layanan sosial seperti kesehatan dan pendidikan (Mangkoesebroto dalam Winarti, 2014: 32). Teoriperkembangan peranan pemerintah yang dikemukakan oleh Musgrave dan

Rostow adalah suatu pandangan yang ditimbulkan dari pengamatan berdasarkan pembangunan ekonomi yang dialami banyak negara, tetapi tidak didasarkan pada suatu teori tertentu.

b) Teori Wagner

Teori yang menjelaskan perkembangan persentase pengeluaran pemerintah yang semakin besar terhadap *Gross National Product* (GNP). Wagner menyatakan bahwa secara relatif pengeluaran pemerintah akan ikut meningkat ketika pendapatan perkapita meningkat. Penyebab utamanya karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya (Mangkoesebroto dalam Winarti, 2014: 31).

c) Teori Peacock dan Wiseman

Teori yang berlandaskan pada suatu pandangan dimana masyarakat tidak menyukai untuk membayar pajak yang tinggi, akan tetapi sebaliknya pemerintah terus berusaha memperbesar pengeluarannya dengan penerimaan dari pajak yang menjadi andalannya. Peacock dan Wiseman memberikan pernyataan: masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah (Mangkoesebroto dalam Winarti, 2014: 31).

Pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) yaitu sebuah tindakan pemerintah dengan cara menentukan besarnya pengeluaran dan penerimaan pemerintah setiap tahunnya untuk mengatur jalannya perekonomiannya, yang

tergambarkan dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah/regional. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pengeluaran pemerintah Indonesia secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam dua golongan yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin pada dasarnya berunsurkan pos-pos pengeluaran untuk membiayai pelaksanaan roda pemerintahan sehari-hari meliputi belanja pegawai, belanja barang, berbagai macam subsidi (subsidi daerah dan subsidi harga barang), angsuran dan utang pemerintah serta jumlah pengeluaran lain. Sedangkan pengeluaran pembangunan maksudnya adalah pengeluaran yang bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk prasarana fisik, yang dibedakan atas pembangunan yang dibiayai dengan dana rupiah dan bantuan proyek (Patta, 2012: 32).

Menurut Suparmoko yang dikutip oleh Desi dalam (Patta, 2012: 31) bahwa pengeluaran pemerintah dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Pengeluaran itu merupakan investasi yang menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi dimasa yang akan datang.
2. Pengeluaran itu langsung memberikan kesejahteraan dan kegembiraan bagi masyarakat.
3. Merupakan penghematan pengeluaran yang akan datang.
4. Menyediakan kesempatan yang lebih banyak dan penyebaran tenaga beli yang lebih luas.

C. Hubungan Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Pendidikan merupakan salah satu tujuan pembangunan yang mendasar, pendidikan bersifat esensial bagi kehidupan yang memuaskan dan berharga serta fundamental kaitannya dengan gagasan lebih luas mengenai peningkatan kapabilitas manusia sebagai inti makna pembangunan yang sesungguhnya. Menurut Todaro (2011) dengan pendapatan yang lebih tinggi maka warga dan pemerintah dapat mengeluarkan dana yang lebih besar untuk kepentingan pendidikan, dan dengan pendidikan yang lebih baik produktivitas dan pendapatan yang lebih tinggi akan mudah tercapai.

Konsep pendidikan sebagai sebuah investasi berkembang secara pesat dan semakin diyakini oleh setiap negara bahwa pembangunan bidang pendidikan merupakan prasyarat kunci bagi pertumbuhan pembangunan bidang lainnya. Pendidikan telah diidentifikasi sebagai faktor kunci dalam pembangunan ekonomi dan sosial, dan kesetaraan akses terhadap pendidikan yang berkualitas telah menjadi tujuan penting dari kebijakan pembangunan. Negara dengan tingkat ketimpangan pendidikan tinggi secara konsisten menunjukkan tingkat inovasi yang lebih rendah, rendahnya tingkat efisiensi produksi, dan kecenderungan untuk mentransmisi kemiskinan lintas generasi (World Bank dalam Winarti, 2014: 11).

Isu mengenai sumber daya manusia (*human capital*) sebagai input pembangunan ekonomi sebenarnya telah dimunculkan oleh Adam Smith pada

tahun 1776 yang mencoba menjelaskan penyebab kesejahteraan suatu negara dengan memberikan dua faktor yaitu; pentingnya skala ekonomi dan pembentukan keahlian dan kualitas manusia (Khusaini dalam Syam, 2014: 21). Pemerintah menempatkan pendidikan sebagai faktor penting dalam menunjang pembangunan nasional. Hal tersebut terlihat dari besarnya pengeluaran pemerintah untuk bidang pendidikan. Pemerintah menyediakan APBN untuk bidang pendidikan.

Investasi dalam hal pendidikan mutlak dibutuhkan maka pemerintah harus dapat membangun suatu sarana dan sistem pendidikan yang baik. Alokasi anggaran pengeluaran pemerintah terhadap pendidikan merupakan wujud nyata dari investasi untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Pengeluaran pembangunan pada bidang pembangunan dapat dialokasikan untuk penyediaan infrastruktur pendidikan dan menyelenggarakan pelayanan pendidikan kepada seluruh penduduk Indonesia secara merata. Anggaran pendidikan di APBN merupakan wujud realisasi pemerintah untuk meningkatkan Pendidikan. Pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan akan berpengaruh terhadap perkembangan di bidang pendidikan yaitu dengan meningkatnya jumlah murid yang mampu menyelesaikan sekolahnya sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Semakin tinggi rata-rata tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat, maka semakin mudah bagi setiap individu dalam usia bekerja untuk mengerti, menerapkan dan mendapatkan hasil dari kemajuan teknologi dan akhirnya meningkatkan standar ekonomi dan hidup bangsa. Suatu bangsa harus meningkatkan investasi bidang pendidikan dan kesehatan untuk mencapai

pembangunan (Meier, dalam Winarti, 2014: 41).

D. Hubungan Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Kesehatan adalah salah satu tujuan pembangunan yang mendasar, kesehatan sangat penting artinya bagi kesejahteraan dan fundamental dalam kaitannya dengan gagasan lebih luas mengenai peningkatan kapabilitas manusia sebagai inti makna pembangunan yang sesungguhnya. Kesehatan juga merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas. Menurut Todaro (2011) dengan pendapatan lebih tinggi maka warga negara dan pemerintah dapat mengeluarkan dana yang lebih besar untuk kepentingan kesehatan dan dengan kesehatan yang lebih baik produktivitas dan pendapatan lebih tinggi akan lebih mudah tercapai.

Tenaga kerja yang sehat secara fisik dan mental akan lebih bersemangat dan lebih produktif dalam menjalankan pekerjaannya. Keadaan seperti ini sering terjadi pada negara-negara sedang berkembang, dimana proporsi terbesar dari angkatan kerja masih melakukan pekerjaannya secara manual. Selanjutnya, anak yang sehat mempunyai kemampuan belajar lebih baik dan akan tumbuh menjadi dewasa dan lebih terdidik. Menurut Juanita dalam Wahid (2012) dalam keluarga yang sehat, pendidikan anak cenderung tidak terputus jika dibandingkan dengan keluarga yang tidak sehat. Sedangkan pada tingkat makro, penduduk dengan kesehatan yang baik merupakan salah satu input penting untuk menurunkan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi jangka panjang.

Becker dalam Saputri (2014: 25) menyatakan bahwa salah satu cara untuk

berinvestasi dalam *human capital* adalah dengan meningkatkan kesehatan emosional dan fisik. Semakin banyak pemerintah mengeluarkan dana pada bidang kesehatan, maka kemungkinan besar masyarakat akan hidup sehat. Dalam indeks pembangunan manusia juga terdapat indeks kesehatan yang didalamnya terdapat angka harapan hidup, dimana orang yang memiliki kesehatan yang baik akan memiliki umur panjang yang kemungkinan besar juga dapat mempengaruhi kualitas hidupnya. Permasalahan kesehatan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia, tanpa kesehatan masyarakat tidak dapat menghasilkan suatu produktivitas bagi negara. Kegiatan ekonomi suatu negara akan berjalan jika ada jaminan kesehatan bagi setiap penduduknya.

2.1.1.2 Kemiskinan

Secara etimologi, “kemiskinan” berasal dari kata “miskin” yang artinya tidak berharta benda dan serba kekurangan. Badan Pusat Statistik mendefinisikan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (BPS, 2019) lebih jauh disebutkan kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada dibawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makan dan non makan yang disebut garis kemiskinan (*poverty line*) atau disebut juga batas kemiskinan (*poverty threshold*).

Kemiskinan biasanya dikenali dari ketidak mampuan sebuah rumah tangga atau seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar sebagai kaitan yang mencitrakan orang tersebut menjadi miskin. Kemiskinan memiliki wujud majemuk termasuk rendahnya tingkat pendapatan dan sumberdaya produktif yang menjamin kehidupan yang berkesinambungan yaitu kelaparan dan kekurangan gizi,

rendahnya tingkat pendapatan, serta diskriminasi. Kemiskinan juga dicirikan oleh tingkat partisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang rendah.

Dapat disimpulkan bahwa kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat disuatu daerah. Kondisi tidak mampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan pendidikan.

A. Ukuran Kemiskinan

Berdasarkan garis kemiskinan yang digunakan setiap negara ternyata berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan lokasi dan standar kebutuhan hidup. Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan batas miskin dari besarnya rupiah yang dibelanjakan per kapita sebulan untuk memenuhi kebutuhan minuman makanan dan bukan makanan. Untuk kebutuhan minuman makanan digunakan patokan 2.100 kalori per hari, sedangkan pengeluaran kebutuhan bukan makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, sandang serta barang dan jasa.

BPS menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*) untuk mengukur kemiskinan. Dalam metode BPS, kemiskinan menurut pendekatan kebutuhan dasar dikonseptualisasikan sebagai ketidak mampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar ada 3

indikator yang digunakan yaitu tingkat kemiskinan/head count index, index kedalaman kemiskinan, dan indeks keparahan kemiskinan.

1. Tingkat Kemiskinan (*Head Count Indek-PO*), yaitu persentase penduduk miskin yang berada dibawah garis kemiskinan (GK).
2. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Proverty Gap Indek-PI*), yaitu ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.
3. Indeks Keparahhan Kemiskinan (*Proverty Severity Indek-P2*), yaitu gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi pula ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Garis kemiskinan merupakan satu ukuran kemiskinan yang menyatakan besarnya pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan makan dan kebutuhan non makan atau standar seseorang yang dikatakan miskin bila dipandang dari sudut konsumsi. Garis kemiskinan yang digunakan setiap negara berbeda-beda sehingga tidak ada garis kemiskinan yang berlaku umum. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan lokasi dan standar kebutuhan hidup. Menurut Badan Pusat Statistik terdapat beberapa konsep garis kemiskinan antara lain :

- a. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non makan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

- b. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori perkapita perhari.
- c. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.

B. Penyebab Kemiskinan

Dilihat dari penyebabnya kemiskinan dibagi menjadi dua yaitu kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Kemiskinan kultural merupakan suatu kondisi kemiskinan yang terjadi karena kultur, budaya, atau adat istiadat yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat. Kebiasaan masyarakat yang merasa cepat puas akan sesuatu yang telah dicapai, sifat bermalas-malasan dan cara berpikir masyarakat yang kurang rasional dapat menyebabkan terjadinya kemiskinan. Sedangkan kemiskinan struktural merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh alam yang kurang menguntungkan berupa tanah yang tandus, letak daerah yang terpencil, tidak adanya sumberdaya mineral dan non mineral, serta miskinnya fasilitas-fasilitas publik yang dibutuhkan.

C. Teori Kemiskinan

Sharp et al. (1996) dalam kuncoro (2015) mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, secara mikro, kemiskinan muncul karna adanya ketidaksamaan pola pemikiran sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah berarti produktivitasnya juga rendah

yang pada gilirannya upah yang diterimanya juga rendah. Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.

2.1.1.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Menurut (Ariza, 2016) Indeks pembangunan Manusia (IPM) merupakan tolak ukur perbandingan dari harapan hidup, pendidikan dan standar hidup bagi semua negara yang ada di dunia. IPM berfungsi untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara merupakan negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang serta juga sebagai pengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Kesejahteraan penduduk adalah tujuan setiap daerah yang dapat tercapai dengan pembangunan ekonomi. IPM adalah angka yang diolah berdasarkan tiga dimensi yaitu:

1. Panjang usia (*longevity*), yang diukur berdasarkan angka harapan hidup saat lahir.
2. Pengetahuan (*knowledge*), yang diukur berdasarkan angka melek huruf orang dewasa dan gabungan partisipasi sekolah di tingkat sekolah dasar, menengah, dan perguruan tinggi (dengan pembobotan yang sama pada kedua indikator).
3. Standar hidup (*standar of living*) suatu bangsa yang diukur oleh pendapatan riil per kapita.

Secara teknis ketiga dimensi ini dijabarkan menjadi beberapa indikator yaitu kesehatan (dan kependudukan), pendidikan, serta ekonomi. Ini berarti pembangunan manusia merupakan manifestasi dari aspirasi dan tujuan suatu bangsa yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan secara struktural melalui upaya yang sistematis. Pembangunan manusia merupakan suatu upaya untuk

memperluas pilihan-pilihan yang dimiliki manusia yang dapat terealisasi apabila manusia berumur panjang dan sehat, memiliki pengetahuan dan keterampilan, serta dapat memanfaatkan kemampuan yang dimilikinya dalam kegiatan yang produktif. Hal tersebut sekaligus merupakan tujuan utama dari pembangunan yaitu untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan dan kesehatan merupakan modal utama yang harus dimiliki manusia agar mampu meningkatkan potensinya. Umumnya semakin tinggi kapabilitas dasar yang dimiliki suatu bangsa, semakin tinggi peluang untuk meningkatkan potensi bangsa.

Dari ketiga dimensi tersebut bukanlah suatu ukuran yang menyeluruh tentang pembangunan manusia. Sebagai contoh, indeks pembangunan manusia tidak menyertakan indikator-indikator penting seperti penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan politik. Indeks ini memberikan sudut pandang yang lebih luas untuk menilai kemajuan manusia serta meninjau hubungan yang rumit antara penghasilan dan kesejahteraan (UNDP, 2016).

Indikator Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu cara untuk mengukur taraf kualitas fisik dan non fisik penduduk. Kualitas fisik tercermin dari angka harapan hidup sedangkan kualitas non fisik (intelektualitas) tercermin melalui lamanya rata-rata penduduk bersekolah dan angka melek huruf dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat yang tercermin dari nilai Purchasing Power Parity Indeks (PPP) (Adi:2011:2).

Ada beberapa komponen Indeks Pembangunan Manusia antara lain, yaitu (BPS, 2019):

1. Indeks Pendidikan

Perhitungan Indeks Pendidikan (IP) mencakup dua indikator yaitu angka melek huruf (LIT) dan rata-rata lama sekolah (MYS). Populasi yang digunakan adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas karena pada kenyataannya penduduk usia tersebut sudah ada yang berhenti sekolah. Batasan ini diperlukan agar angkanya lebih mencerminkan kondisi sebenarnya, mengingat penduduk yang berusia kurang dari 15 tahun masih dalam proses sekolah atau akan sekolah sehingga belum pantas untuk rata-rata lama sekolahnya. Kedua indikator pendidikan ini dimunculkan dengan harapan dapat mencerminkan tingkat pengetahuan (cerminan angka LIT), dimana LIT merupakan proporsi penduduk yang memiliki kemampuan baca tulis dalam suatu kelompok penduduk secara keseluruhan. Sedangkan cerminan angka MYS merupakan gambaran terhadap keterampilan yang dimiliki penduduk.

2. Indeks Harapan Hidup

Indeks Harapan Hidup menunjukkan jumlah tahun hidup yang diharapkan dapat dinikmati penduduk suatu wilayah. Dengan memasukan informasi mengenai angka kelahiran dan kematian pertahun, variabel tersebut diharapkan akan mencerminkan rata-rata lama hidup sekaligus hidup sehat masyarakat. Sehubungan dengan sulitnya mendapatkan informasi orang yang meninggal pada kurun waktu tertentu, maka untuk menghitung angka harapan hidup digunakan metode tidak langsung. Data dasar yang dibutuhkan dalam metode ini adalah rata-rata anak lahir hidup dan rata-rata anak masih hidup dari wanita pernah kawin. Untuk mendapatkan Indeks harapan hidup dengan cara menstandarkan

angka harapan hidup terhadap nilai maksimum dan minimumnya.

3. Indeks Daya Beli (Indeks Pendapatan)

Kemampuan daya beli penduduk atau purchasing power parity (PPP) merupakan suatu indikator yang digunakan untuk melihat kondisi ekonomi masyarakat dalam menghitung indeks pembangunan manusia. Kemampuan daya beli ini lebih mencerminkan kemampuan masyarakat secara ekonomi dalam memenuhi kebutuhan konsumsinya, dan sangat jauh berbeda dengan PDRB perkapita atau yang dikenal dengan pendapatan perkapita. Untuk mengukur standar hidup, data PDRB perkapita tidak dapat digunakan karena bukan ukuran yang peka untuk kemampuan daya beli penduduk. Oleh sebab itu, perhitungan daya beli penduduk menggunakan konsumsi perkapita yang kemudian disesuaikan.

Setelah dilakukan perhitungan pengeluaran perkapita setahun yang disesuaikan, selanjutnya perhitungan indeks pendapatan. Indeks pendapatan menunjukkan kemampuan daya beli masyarakat, oleh karena itu semakin tinggi indeks pendapatan maka semakin tinggi daya beli perkapita penduduk. Peningkatan kemampuan daya beli secara implisit menunjukkan kenaikan kesejahteraan melalui kenaikan pendapatan dan stabilitas harga, sehingga pada akhirnya mutu pembangunan manusia meningkat. Konsep tersebut lebih mengonsumsikan bahwa kenaikan indeks daya beli atau kenaikan pengeluaran perkapita riil yang disesuaikan sejalan dengan kenaikan pendapatan absolut dan pendapatan

Merujuk pada ketiga indikator pembangunan manusia, maka angka indeks pembangunan manusia dapat dihitung dengan menggunakan rumus (BPS,2004):

$$IPM = 1/3 \times (IPD \times IHH \times IP)$$

Keterangan: IPM (Indeks Pembangunan Manusia)

IPD (Indeks Pendidikan)

IHH (Indeks Harapan Hidup)

IP (Indeks Pendapatan Daya Beli)

2.1.2 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa peneliti yang telah melakukan penelitian tentang pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian tersebut digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan dalam penelitian ini. Adapun peneliti terdahulu yang relevan dengan peneliti ni diantaranya antara lain.

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian
1.	Jurnal Rahmita Handayani 2015	Analisis Pengeluaran Pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau	Dari hasil penelitian ini bahwa hasil analisisnya yaitu pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM Provinsi Riau.
2.	Jurnal Merang Kahang, Muhammad Saleh, Rachmad Budi Suharto, 2016	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di bidang Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kutai Timur	Dimana hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kutai Timur,

			sedangkan pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kutai Timur.
3.	Jurnal M. Alyuriza Syalkafi, 2016	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah Bidang pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung pada tahun 1999-2014	Variabel Pertumbuhan ekonomi dan variabel pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan bidang kesehatan secara bersama-sama berpengaruh positive dan signifikan terhadap variabel Indeks Pembangunan Manusia.

2.1.3 Kerangka Berpikir

a. Pengaruh pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Pengeluaran dalam hal pendidikan mutlak dibutuhkan maka pemerintah harus dapat membangun suatu sarana dan sistem pendidikan yang baik. Alokasi anggaran pengeluaran pemerintah terhadap pendidikan merupakan wujud nyata dari investasi untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Pengeluaran pembangunan pada sektor pembangunan dapat dialokasikan untuk penyediaan infrastruktur pendidikan dan menyelenggarakan pelayanan pendidikan kepada seluruh penduduk Indonesia secara merata. Anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN merupakan wujud realisasi pemerintah untuk meningkatkan Pendidikan. Pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan akan berpengaruh terhadap perkembangan

di sektor pendidikan yaitu dengan meningkatnya jumlah murid yang mampu menyelesaikan sekolahnya sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Sehingga suatu negara harus meningkatkan pengeluaran dalam bidang pendidikan pembangunan.

b. Pengaruh pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia

Pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Kesehatan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi sumber daya manusia, dengan kata lain aspek kesehatan turut mempengaruhi kualitas manusia. Kekurangan kalori, gizi, ataupun rendahnya derajat kesehatan bagi penduduk akan menghasilkan kualitas manusia yang rendah dengan tingkat mental yang terbelakang. Pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan yang di keluarkan untuk memenuhi salah satu hak dasar untuk memperoleh pelayanan kesehatan berupa fasilitas dan pelayanan kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas masyarakat.

c. Pengaruh pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan terhadap tingkat kemiskinan

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) besarnya pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan adalah besarnya pengeluaran belanja pemerintah untuk pendidikan (termasuk gaji) yang dialokasikan minimal 20 persen dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan. Begitu juga dengan di daerah, alokasi minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan adanya pendidikan, masyarakat akan memperoleh ilmu pengetahuan, kecakapan dan keterampilan. Dalam hal ini peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan, terutama masyarakat yang tergolong dalam kategori penduduk miskin.

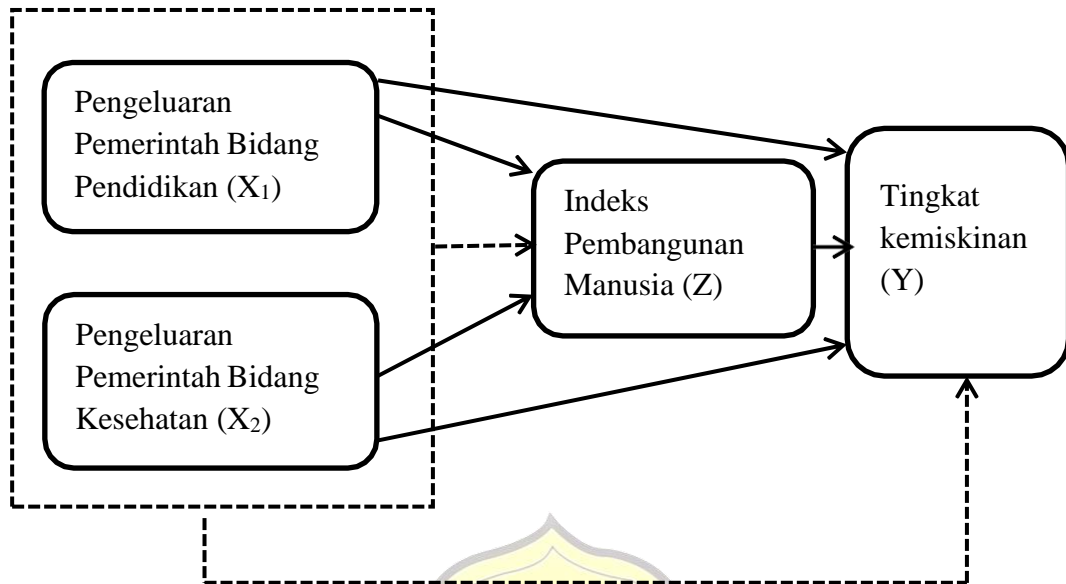
d. Pengaruh pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan terhadap tingkat kemiskinan

Menurut BPS, pengeluaran pemerintah untuk kesehatan adalah besarnya pengeluaran belanja pemerintah untuk Kesehatan selain gaji yang dialokasikan minimal sebesar 5 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor kesehatan. Sedangkan alokasi di daerah adalah minimal 10 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Besaran anggaran kesehatan tersebut diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan publik yang besarnya sekurangkurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari anggaran kesehatan dalam APBN dan APBD. Alokasi pembiayaan kesehatan tersebut ditujukan untuk pelayanan kesehatan di bidang pelayanan publik, terutama bagi penduduk miskin, kelompok lanjut usia dan anak terlantar. Maka dari itu, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan ini memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia.

e. Pengaruh pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan dan kesehatan terhadap tingkat kemiskinan

Pengeluaran dalam bidang pendidikan dan kesehatan dapat mempengaruhi indkes pembangunan manusia lebih besar bidang lain seperti bidang energi, perumahan dan perlindungan lingkungan. Analisis lebih lanjut mengenai pengeluaran pemerintah menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di seluruh negara bagian dan masa yang sedang dipertimbangkan. Namun, efek relatif dari pengeluaran pemerintah dalam memperbaiki pembangunan manusia lebih besar daripada pengeluaran lainnya. Seperti yang dijelaskan oleh Pake (2018) bahwa pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan dan kesehatan secara bersama-sama memiliki pengaruh pada indeks pembangunan manusia. Hal tersebut berarti bahwa pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan dan kesehatan tidak bisa berdiri sendiri dan harus secara bersama-sama.

Secara singkat kerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan pada Gambar 1. Penelitian ini akan menggunakan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan sebagai determinan IPM di Provinsi Jambi.



Keterangan:

- > = secara parsial
- - - - -> = secara simultan

Gambar 2.1 : Bagan Kerangka Pemikiran

2.1.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan landasan teori, dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :

1. Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan bidang kesehatan berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jambi.
2. Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan bidang kesehatan berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jambi.

3. Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan bidang kesehatan berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi.
4. Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan bidang kesehatan berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi.

2.2 Metodologi Penelitian

2.2.1 Metode Penelitian yang Digunakan

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang disusun untuk meneliti kemungkinan adanya hubungan sebab akibat antar variabel. Pendekatan deskriptif untuk menggambarkan hubungan yang terjadi diantara variabel yang dilibatkan dalam penelitian (Sugiyono, 2019). Dalam hal ini yang menjadi variabel independen adalah pengeluaran pemerintah, sedangkan yang menjadi variabel dependennya adalah tingkat kemiskinan melalui Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jambi.

2.2.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berbentuk angka kuantitatif tahunan dari 2017 hingga 2021. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi, meliputi data Kemiskinan, Kesehatan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2017-2021.

2. Data dari *website* Kementerian Keuangan RI, meliputi data pengeluaran keuangan Provinsi Jambi untuk bidang pendidikan dan kesehatan tahun 2017-2021.
3. Sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penelitian, seperti internet, buku serta hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

2.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan dokumentasi. Dokumentasi, dari asal kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis (Arikunto, 2013). Dalam penelitian ini peneliti menyelidiki penelitian terdahulu, buku, jurnal, internet serta karya tulis lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

2.2.4 Operasionalisasi Variabel Penelitian

Definisi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

No.	Variabel	Indikator	Satuan
1	Pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan (X_1)	Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan adalah realisasi pengeluaran pemerintah bidang pendidikan Provinsi Jambi periode tahun 2017-2021.	Milyar Rupiah
2	Pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan (X_2)	Pengeluaran pemerintah bidang kesehatan realisasi pengeluaran pemerintah bidang kesehatan Provinsi Jambi periode tahun 2017-2021.	Milyar Rupiah
3	Indeks Pembangunan Manusia (Y)	Indeks Pembangunan Manusia merupakan pencapaian rata-rata suatu negara yang mencakup tiga hal mendasar, yaitu indeks harapan hidup, indeks pendidikan, dan indeks pendapatan di Provinsi Jambi tahun 2017-2021.	Persentase (%)
4	Kemiskinan (Z)	Kemiskinan menunjukkan persentase atau tingkat penduduk miskin yang ada di Provinsi Jambi tahun 2017-2021 yang diukur dengan rumus garis kemiskinan. $GK = GKM + GKNM$	Persentase (%)

		GK = Garis Kemiskinan GKM = Garis Kemiskinan Makanan GKNM = Garis Kemiskinan Non Makanan	
--	--	--	--

2.2.5 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kuantitatif dengan alat analisis deskriptif dan analisa inferensial. Analisa deskriptif yaitu cara menguraikan dan menganalisa data dengan menggambarkan sejumlah peristiwa dan objek penelitian yang di tabulasikan ke dalam tabel-tabel serta mengaitkan teori yang ada hubungannya dengan permasalahan tersebut. Di samping itu, menggunakan metode yang bersifat analisis inferensial yaitu model analisis regresi linear berganda dengan persamaan simultan.

Variabel bebas (independent variabel) yang disimbolkan dengan variabel X yaitu Pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan Pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan, serta variabel terikat (dependent variabel) yaitu Indeks Pembangunan Manusia (Y).

Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan bidang kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jambi periode 2017-2021 dengan menggunakan analisis regresi linear sederhana dan regresi linear berganda dengan bantuan Eviews 9. Adapun persamaan regresi linear sederhana dan regresi linear berganda yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + b_1X_{1it} + b_2X_{2it} + e$$

$$Z_{it} = \alpha_1 + b_1X_{1it} + b_2X_{2it} + e$$

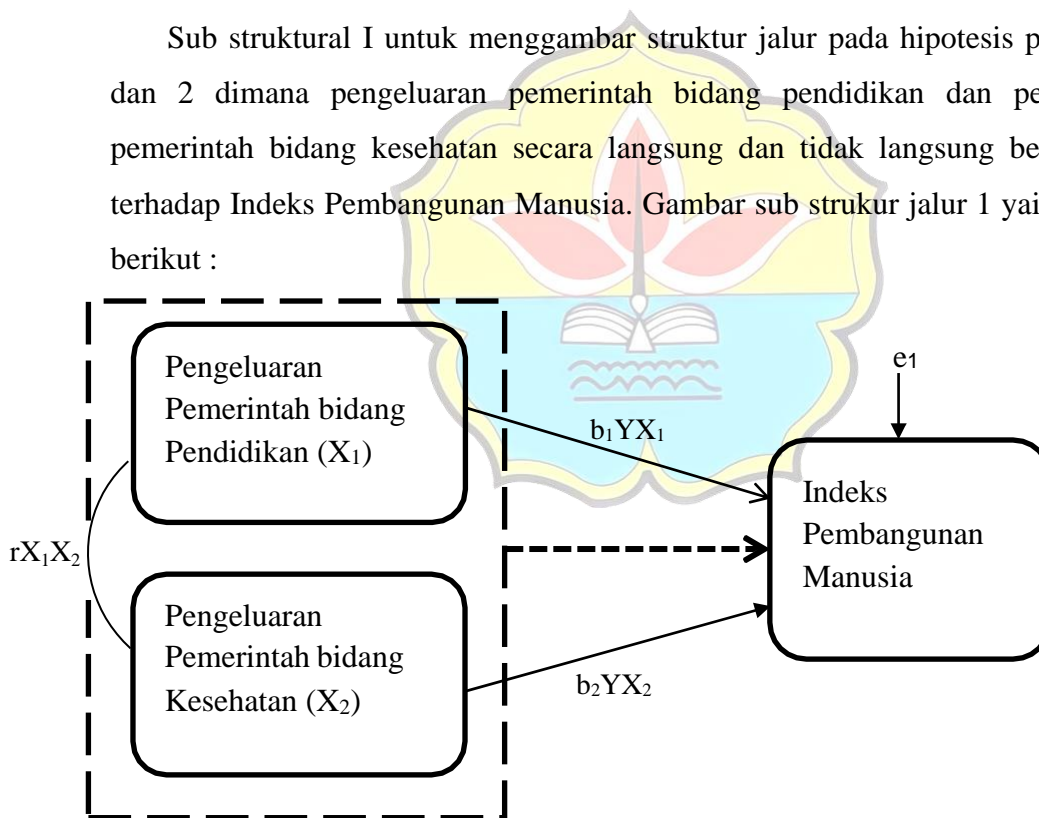
$$Z_{it} = \alpha + b_1Y_{it} + e$$

Keterangan

- Y : Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
- Z : Kemiskinan (jumlah penduduk)
- α : Konstanta
- X₁ : Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan (Rupiah)
- X₂ : Pengeluaran pemerintah bidang kesehatan (Rupiah)
- b₁, b₂ : Koefisien regresi untuk masing-masing variabel X₁ dan X₂
- i : Daerah
- t : Tahun
- e : Error (Variabel pengganggu)

1) Sub Struktural I

Sub struktural I untuk menggambar struktur jalur pada hipotesis penelitian 1 dan 2 dimana pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan secara langsung dan tidak langsung berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Gambar sub struktur jalur 1 yaitu sebagai berikut :



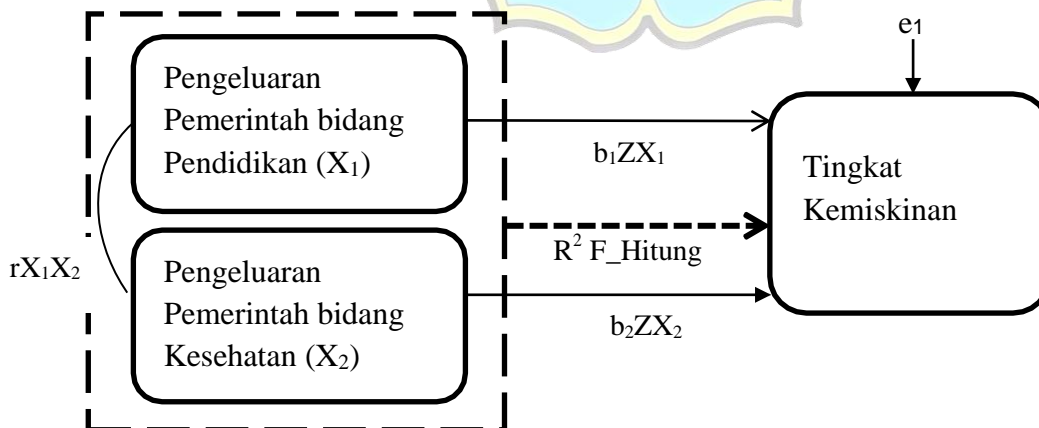
Gambar 2.2 Sub Struktural I

Untuk menjawab hipotesis penelitian 1 dan 2 yaitu pengaruh langsung dan tidak langsung variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan (X₁) dan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan (X₂) terhadap variabel Indeks Pembangunan Manusia (Y) dengan persamaan sebagai berikut:

- Pengaruh langsung dan tidak langsung X_1 terhadap Y .
 $X_1 \longrightarrow Y = b_1 Y_{X_1} \cdot b_1 Y_{X_1}$ (pengaruh langsung).
 $X_1 \longrightarrow Y \text{ melalui } X_2 = b_1 Y_{X_1} \cdot r_{X_1 X_2} \cdot b_1 Y_{X_2}$ (pengaruh tidak langsung).
- Pengaruh langsung dan tidak langsung X_2 terhadap Y .
 $X_2 \longrightarrow Y = b_1 Y_{X_2} \cdot b_1 Y_{X_2}$ (pengaruh langsung).
 $X_2 \longrightarrow Y \text{ melalui } X_1 = b_1 Y_{X_2} \cdot r_{X_1 X_2} \cdot b_1 Y_{X_1}$ (pengaruh tidak langsung).
- Pengaruh langsung dan tidak langsung X_1 dan X_2 secara bersama-sama terhadap Y .
 $X_1 \text{ dan } X_2 \longrightarrow Y = (b_1 Y_{X_1} \cdot b_1 Y_{X_1}) + (b_1 Y_{X_2} \cdot b_1 Y_{X_2})$
(Pengaruh langsung).
 $X_1 \text{ dan } X_2 \longrightarrow Y = (b_1 Y_{X_1} \cdot r_{X_1 X_2} \cdot b_1 Y_{X_2}) + (b_1 Y_{X_2} \cdot r_{X_1 X_2} \cdot b_1 Y_{X_1})$ (pengaruh tidak langsung).

2) Sub Struktural II

Sub struktural II untuk menggambar struktur jalur pada hipotesis penelitian 3 dan 4 dimana pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan secara langsung dan tidak langsung berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Gambar sub struktural II yaitu sebagai berikut :



Gambar 2.3 Sub Struktural II

Untuk menjawab hipotesis penelitian 3 dan 4 yaitu pengaruh langsung dan tidak langsung variabel pendapatan asli daerah (X_1) dan dana perimbangan (X_2) terhadap variabel pertumbuhan ekonomi (Z) dengan persamaan sebagai berikut:

- Pengaruh langsung dan tidak langsung X_1 terhadap Z .

$$X_1 \longrightarrow Z = b_1Z_{X_1}. b_1Z_{X_1} \text{ (pengaruh langsung).}$$

$$X_1 \longrightarrow Z \text{ melalui } X_2 = b_1Z_{X_1}. r_{X_1X_2}. b_1Z_{X_2} \text{ (pengaruh tidak langsung).}$$

- Pengaruh langsung dan tidak langsung X_2 terhadap Z .

$$X_2 \longrightarrow Z = b_1Z_{X_2}. b_1Z_{X_2} \text{ (pengaruh langsung).}$$

$$X_2 \longrightarrow Z \text{ melalui } X_1 = b_1Z_{X_2}. r_{X_1X_2}. b_1Z_{X_1} \text{ (pengaruh tidak langsung).}$$

- Pengaruh langsung dan tidak langsung X_1 dan X_2 secara bersama-sama terhadap Z .

$$X_1 \text{ dan } X_2 \longrightarrow Z \equiv (b_1Z_{X_1}. b_1Z_{X_1}) + (b_1Z_{X_2}. b_1Z_{X_2})$$

(Pengaruh langsung).

$$X_1 \text{ dan } X_2 \longrightarrow Z = (b_1Z_{X_1}. r_{X_1X_2}. b_1Z_{X_2}) + (b_1Z_{X_1}. r_{X_1X_2}. b_1Z_{X_2}) + (b_1Z_{X_2}. b_1Z_{X_2}) \text{ (pengaruh tidak langsung).}$$

Selain itu untuk mengetahui analisis pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan bidang kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia penulis juga menggunakan model berbagai uji untuk pengujian hipotesis yaitu sebagai berikut:

1. Koefisien Determinasi(R-Square)

Koefisien determinasi dapat menginformasikan baik atau tidaknya model

regresi yang diestimasi. Nilai koefisien determinasi mencerminkan seberapa besar variabel terkait dalam mempengaruhi variabel bebasnya. Kisaran nilai koefisien determinasi R^2 adalah 0. Model dikatakan semakin baik apabila nilai R^2 mendekati 1 atau 100% .

2. Uji F (Simultan)

Untuk melihat apakah variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat maka digunakan uji statistik F, dengan kriteria keputusan:

- Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka terdapat hubungan atau pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat.
- Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka tidak terdapat hubungan atau pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikatnya.

3. Uji t (Uji Parsial)

Uji ini pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independent secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependent. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan significance level 0,05 ($\alpha = 5\%$). H_0 di terima jika nilai probabilitas $> (\alpha = 0,05)$, artinya variabel bebas tidak ada pengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Dan H_a diterima jika nilai probabilitas $< (\alpha = 0,05)$, artinya variabel mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Maka dapat dilihat dari nilai probabilitas dibandingkan dengan $\alpha = 0,05$.

4. Uji Asumsi Klasik

Pengujian hipotesis ini dapat dilakukan dengan cara menggunakan metode

analisis regresi berganda yang digunakan untuk mengukur pengaruh variabel independent (X) terhadap variabel dependent (Y).

a. Uji Normalitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah kedua variabel dalam model regresi mempunyai distribusi normal atau tidak. Menurut Widarjono (2013:49) ada 2 metode untuk mengetahui apakah model regresi tersebut normal atau tidak, antara lain sebagai berikut.

a) Histogram Residual, ciri utamanya yaitu bentuk grafik distribusi normal ialah menyerupai lonceng, apabila tidak berbentuk lonceng maka model regresi tersebut mempunyai distribusi tidak normal.

b) Uji Jarque-Bera, model regresi yang mempunyai distribusi normal nilai JB nya harus diatas nilai Chi-Square.

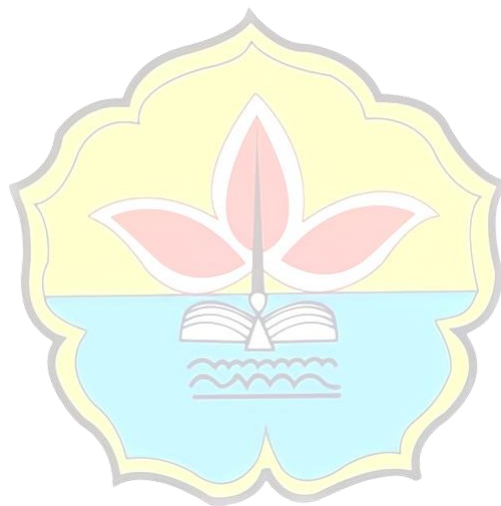
b. Uji Multikolinearitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Jika variabel bebas saling berkorelasi maka variabel-variabel ini tidak ortogonal.

c. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dan residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik seharusnya teradi heteroskedastisitas. Cara mendeteksi apakah model regresi tersebut terjadi heteroskedastisitas atau tidak bisa dilihat dari nilai *chi-square* dengan ketentuan sebagai berikut.

- Nilai chi-Square < nilai kritis, maka tidak terjadi heteroskedastisitas
- Nilai chi-Square > nilai kritis, maka terjadi heteroskedastisitas

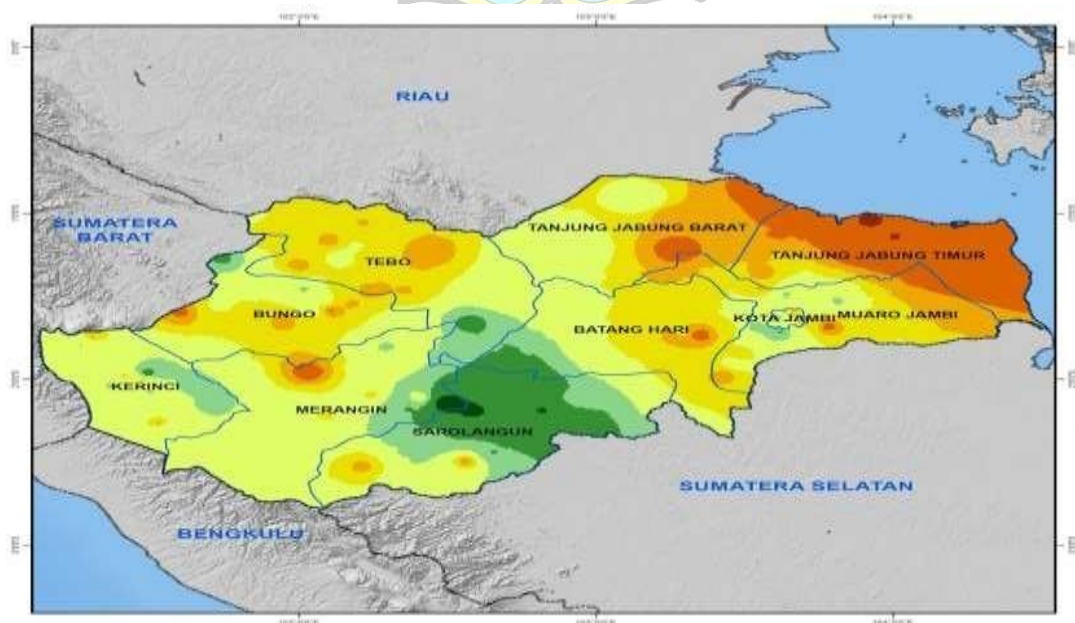


BAB III

GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

3.1 Kondisi Geografis

Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 19 tahun 1957, Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat 1 Sumatera Barat, Jambi, dan Riau, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang – Undang Nomor 61 tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 nomor 112), yang terdiri dari 5 kabupaten dan 1 kota. Pada tahun 1999, dilakukan pemekaran terhadap beberapa wilayah administratif di Provinsi Jambi melalui Undang-Undang nomor 54 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selanjutnya melalui undang-undang nomor 25 tahun 2008, tentang pembentukan Kota Sungai Penuh. Setelah adanya Pemekaran tersebut Provinsi Jambi memiliki 9 Kabupaten dan 2 Kota, dapat dilihat pada gambar 4.1:



Secara geografis, Provinsi Jambi terletak pada 0°45'-2°45' Lintang Selatan dan antara 101°10'-104°55' Bujur Timur. Di sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Riau dan Kepulauan Riau, Sebelah timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan, sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan, dan sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Bengkulu. Posisi provinsi Jambi cukup Strategis karena langsung berhadapan dengan kawasan pertumbuhan ekonomi yaitu IMS-GT (Indonesia, Malaysia, Singapura Growth Triangle).

Provinsi Jambi memiliki topografi wilayah yang bervariasi mulai dari ketinggian 0 m dpl dibagian timur sampai pada ketinggian diatas 1000 m dpl. Semakin ke arah barat morfologi lainnya semakin tinggi dimana bagian barat merupakan kawasan pergunungan Bukit Barisan yang berbatasan dengan Provinsi Bengkulu dan Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian dari kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat.

Provinsi Jambi sebagai salah satu Provinsi di Sumatera yang terkenal dengan iklim tropis dan kaya akan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, namun juga tetap menjadi kerentanan terhadap perubahan iklim. Sepanjang tahun 2015, Provinsi Jambi memiliki karakteristik curah hujan sedang dan lembab, sehingga provinsi jambi termasuk daerah yang beriklim tropis. Rata-rata curah hujan mencapai 3.030 mm, sedangkan jumlah penyinaran matahari 4,2 jam per hari dengan kelembapan udara rata-rata sebesar 97%. Suhu udara rata-rata mencapai 27°C, sedangkan untuk dataran tinggi wilayah barat mencapai 22°C.

Luas wilayah Provinsi Jambi adalah 52.435,72 km² dengan luas daratan 50.160,05 km² dan luas perairan 3.274,95 km². Daerah yang memiliki luas wilayah terbesar adalah Kabupaten Merangin yaitu 7.679,00 km² atau 15,31 persen dari luas wilayah Provinsi Jambi. Sementara daerah yang memiliki luas terkecil adalah Kota Jambu yaitu 205,43 km² atau 0,41 persen dari luas wilayah Provinsi Jambi dan Kota Sungai Penuh dengan luas Sekitar 391,50 km² atau 0,78 persen dari luas wilayah Provinsi Jambi.

Tabel 3.1 Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

No.	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase (%)
1	Kerinci	3.355,27	6,69
2	Merangin	7.679,00	15,31
3	Sarolangun	6.184,00	12,33
4	Batang Hari	5.804,00	11,57
5	Muaro Jambi	5.326,00	10,62
6	Tanjung Jabung Timur	5.445,00	10,86
7	Tanjung Jabung Barat	4.649,85	9,27
8	Tebo	6.461,00	12,88
9	Bungo	4.659,00	9,29
10	Kota Jambi	205,43	0,41
11	Kota Sungai Penuh	391,50	0,78
Provinsi Jambi		50.160,05	100,00

Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2022 (diolah)

Dari Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa ada 8 kabupaten yang memiliki luas wilayah diatas rata-rata. Kabupaten tersebut antara lain Kabupaten Merangin dengan luas 7.679 km² atau 15,31 persen dari luas provinsi Kabupaten Tebo dengan luas 6.461 km² atau 12,88 perse dari luas provinsi, Kabupaten Sarolangun dengan luas 6.184 km² atau 12,33 persen dari luas provinsi, Kabupaten Batang Hari dengan luas 5.804 km² atau 11,57 persen dari luas provinsi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Luas 5.445 km² atau 10,86 persen dari luas provinsi, Kabupaten Muaro Jambi dengan luas 5.326 km² atau 10,62 perse dari luas provinsi, Kabupaten

Bungo dengan luas 4.659 km² atau 9,29 persen dari luas provinsi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan luas 4.649,85 km² atau 9,27 persen dari luas provinsi.

3.2 Kondisi Kependudukan

Penduduk Provinsi Jambi berjumlah 3.402.052 jiwa pada tahun 2016 yang terdiri dari 1.736.019 jiwa penduduk laki-laki dan 1.666.033 jiwa penduduk perempuan. Kota Jambi merupakan daerah yang memiliki jumlah penduduk terbanyak yaitu 576.067 jiwa. Besarnya jumlah penduduk di Kota Jambi didorong oleh peranannya sebagai ibukota Provinsi dan juga sebagai pusat perdagangan dan jasa di Provinsi Jambi.

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Jambi Tahun 2016

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)		Total (Jiwa)	Ratio (%)
		Laki-Laki	Perempuan		
1	Kerinci	117,301	117,581	234,882	6.90
2	Merangin	187,588	178,727	366,315	10.77
3	Sarolangun	141,679	136,543	278,222	8.18
4	Batang Hari	132,987	127,644	260,631	7.66
5	Muaro Jambi	206,277	192,880	399,157	11.73
6	Tanjabtim	109,718	103,952	213,670	6.28
7	Tanjabbar	160,977	149,937	310,914	9.14
8	Tebo	170,556	160,406	330,962	9.73
9	Bungo	175,997	168,103	344,100	10.11
10	Kota Jambi	289,713	286,354	576,067	16.93
11	kota Sungai Penuh	43,226	43,906	87,132	2.56
Provinsi Jambi		1,736,019	1,666,033	3,402,052	100

Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2022 (diolah)

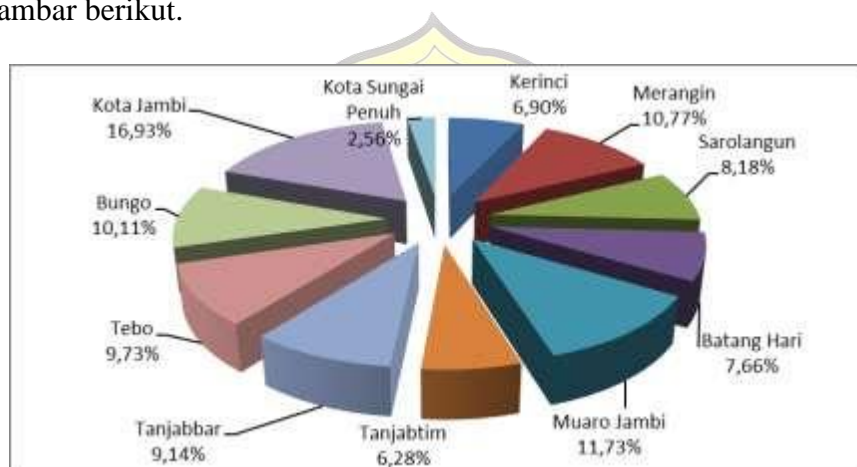
Pada tabel 4.2 dilihat bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan penduduk perempuan. Jumlah penduduk laki-laki di Provinsi Jambi sebanyak 1.736.019 jiwa, sedangkan jumlah penduduk perempuan

adalah sebanyak 1.666.033 jiwa. Terdapat 6 kabupaten/kota yang jumlah penduduk laki-lakinya diatas rata-rata jumlah provinsi, yaitu Kota Jambi dengan jumlah penduduk sebanyak 289.713 jiwa, Kabupaten Muaro Jambi sebanyak 206.227 jiwa, Kabupaten Merangin sebanyak 187.588 jiwa, Kabupaten Bungo sebanyak 175.977 jiwa, Kabupaen Tebo sebanyak 170.556 jiwa, dan Kabupaten Tanjabbar sebanyak.160.977 jiwa. Sedangkan kabupaten/kota dengan jumlah penduduk laki-laki dibawah rata-rata yaitu Kabupaten Sarolangun dengan penduduk sebanyak 141.679 jiwa, Kabupaten Batang Hari sebanyak 132.987 jiwa, Kabupaten Kerinci sebanyak 117.301 jiwa Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebanyak 109.718 jiwa dan Kota Sungai Penuh Sebanyak 43.226 jiwa.

Terdapat 5 kabupaten/kota dengan jumlah penduduk perempuan terbanyak di Provinsi Jambi yaitu Kota Jambi sebanyak 286.354 jiwa, Kabupaten Muaro Jambi sebanyak 192.880 jiwa, Kabupaten Merangin 178.727 jiwa, Kabupaten Bungo sebanyak 168.103 jiwa, Kabupaten Tebo sebanyak 160.406 jiwa. Sedangkan kabupaten/kota yang memiliki jumlah penduduk perempuan dibawah rata-rata terdapat 6 kabupaten/kota antara lain Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak 149.937 jiwa, Kabupaten Sarolangun sebanyak 136.543 jiwa, Kabupaten batang hari sebanyak 127.644 jiwa, Kabupaten Kerinci sebanyak 117.581 jiwa, Kabupaten tanjung jabung Timur sebanyak 103.952 jiwa, dan Kota Sungai Penuh sebanyak 43.906 jiwa.

Berdasarkan total jumlah penduduk, Kota Jambi memiliki jumlah penduduk paling banyak yaitu sebanyak 576.067 jiwa atau sebesar 16,93 persen dari total jumlah penduduk keseluruhan Provinsi, sedangkan jumlah penduduk

paling sedikit terdapat pada Kota Sungai Penuh yaitu sebanyak 87.132 jiwa atau 2,66 persen dari total provinsi, kabupaten/kota yang memiliki jumlah penduduk diatas rata-rata antara lain Kabupaten Muaro Jambi yaitu sebanyak 399.157 jiwa atau 11,73 persen dari total provinsi, Kabupaten Merangin sebanyak 366.315 jiwa atau 10,77 persen dari total provinsi, Kabupaten Bungo sebanyak 344.100 jiwa atau 10,11 persen dari total provinsi, Kabupaten Tebo sebanyak 360,962 jiwa atau 9,73 persen dari total provinsi dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak 310.914 jiwa atau 9,14 persen dari total provinsi. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3.1 Persentase Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2018

Penduduk dibawah rata-rata antara lain Sarolangun sebanyak 278.222 jiwa atau 8,18 persen dari total Provinsi, Batanghari sebanyak 260.631 jiwa atau 7,66 persen dari total Provinsi, Kabupaten Kerinci sebanyak 234.882 jiwa atau 6,90 persen dari total provinsi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebanyak 213.670 jiwa atau 6,28 persen dari total provinsi. Laju pertumbuhan penduduk digunakan sebagai alat untuk menganalisis perkembangan jumlah penduduk di Provinsi Jambi. Dalam lima tahun terakhir rata-rata Laju pertumbuhan penduduk di

Provinsi Jambi sebesar 1,93 persen. Untuk kabupaten/kota yang memiliki laju pertumbuhan penduduk tertinggi ialah Kabupaten Muaro Jambi dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk sebesar 3,08 persen, dan rata-rata laju pertumbuhan penduduk terendah terdapat pada Kabupaten Kerinci dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduknya sebesar 0,47 persen pertahun.

3.3 Gambaran Tingkat Kemiskinan Provinsi Jambi

Kemiskinan yaitu suatu kondisi ketika seseorang atau sekelompok orang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar, atau kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. Kemiskinan dapat dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Kemiskinan dapat terjadi karena sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Tentunya dalam menanggulangi kemiskinan, perlu adanya manajemen pengeluaran pemerintah di suatu daerah yang biasanya meliputi pengeluaran dalam bidang pendidikan dan bidang kesehatan. Berikut data tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi periode 2017-2021:

Tabel 3.3 Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jambi Periode 2017-2021

Wilayah	Tahun (Persen)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Kerinci	70.03	70.59	70.95	71.21	71.45
Merangin	68.30	68.81	69.07	69.19	69.53
Sarolangun	69.03	69.41	69.72	69.86	70.25
Batanghari	68.92	69.33	69.67	69.84	70.11
Muaro Jambi	67.86	68.34	69.01	69.18	69.55
Tanjung Jabung Timur	62.61	63.32	63.92	64.43	64.91
Tanjung Jabung Barat	66.15	67.13	67.54	67.54	68.16
Tebo	68.16	68.67	69.02	69.14	69.35
Bungo	69.04	69.42	69.86	69.92	70.15
Kota Jambi	76.74	77.41	78.26	78.37	79.12
Kota Sungai Penuh	73.75	74.67	75.36	75.42	75.70
Provinsi Jambi	69.99	70.65	71.26	71.29	71.63

Berdasarkan data kondisi kemiskinan di Provinsi Jambi diatas, terlihat bahwa tingkat kemiskinan di kabupaten/kota di provinsi jambi selama tahun 2017-2021 mengalami kenaikan dan penurunan (fluktuatif). Tingkat kemiskinan paling tinggi diantara kabupaten/kota lain yang ada di Provinsi Jambi terjadi di Kota Jambi dari tahun 2017-2021. Diikuti dengan kabupaten Tanjung Jabung Barat di urutan kedua tertinggi kemudian dirutan ketiga kabupaten Merangin. Tingkat kemiskinan ini terjadi akibat banyaknya jumlah pengangguran di kabupaten/kota tersebut. Dengan demikian kenaikan indeks pembangunan manusia di Provinsi Jambi tidak diikuti dengan penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi.

3.4 Gambaran Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Provinsi Jambi

Suatu daerah dikatakan berhasil dalam pembangunan manusia adalah apabila sumber daya manusianya memiliki kualitas pendidikan yang baik. Semakin maju atau semakin tinggi kualitas pendidikan maka akan meningkatkan sumber daya manusia yang dimiliki oleh daerah. Untuk menunjang kualitas pendidikan agar semakin maju, tentu perlu adanya aspek yang mendukung seperti pendanaan yang cukup besar. Hal ini yang menyebabkan pengeluaran pemerintah dalam bidang pendidikan di Provinsi Jambi cukup besar. Berikut data pengeluaran pemerintah bidang pendidikan Provinsi Jambi:

Tabel 3.4 Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan di Provinsi Jambi
Periode 2017-2021

Wilayah	Tahun (Milyar Rupiah)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Kerinci	217.50	209.17	294.58	336.90	345.51
Merangin	395.98	378.38	416.22	404.77	406.78
Sarolangun	311.75	313.87	362.50	374.39	386.41
Batanghari	324.61	320.00	348.05	365.23	367.12
Muaro Jambi	317.96	374.95	417.08	405.17	406.52
Tanjung Jabung Timur	300.08	303.85	305.10	306.06	308.15
Tanjung Jabung Barat	254.08	296.06	303.49	354.27	357.38
Tebo	277.22	289.64	304.48	316.42	324.26
Bungo	332.69	343.39	337.03	384.91	398.23
Kota Jambi	458.59	442.59	451.74	501.57	543.87
Kota Sungai Penuh	163.53	171.29	180.56	186.26	191.36
Provinsi Jambi	3353.99	3443.19	3720.83	3935.95	4035.59

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa jumlah pengeluaran pemerintah untuk bidang Pendidikan di wilayah kabupaten/kota Provinsi Jambi mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2017 sampai tahun 2021 jumlah pengeluaran bidang pendidikan meningkat. Hal ini terjadi agar pendidikan di Provinsi Jambi semakin maju dan dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas.

3.5 Gambaran Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan Provinsi Jambi

Keberhasilan pembangunan suatu daerah dipengaruhi oleh kesehatan di daerah tersebut. Kesehatan menjadi salah satu indikator yang dapat mencerminkan taraf hidup atau kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah. Oleh sebab itu pembangunan di dalam bidang kesehatan sangat penting, karena bertujuan supaya semua kalangan masyarakat dapat menikmati pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau. Penyediaan pelayanan kesehatan yang berkualitas merupakan faktor pendukung yang dapat digunakan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Penyediaan pelayanan kesehatan berupa sarana dan prasarana

memerlukan pembiayaan yang cukup besar oleh pemerintah agar kesehatan masyarakat dapat terpenuhi. Berikut pengeluaran pemerintah bidang kesehatan:

Tabel 3.5 Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan di Provinsi Jambi
Periode 2017-2021

Wilayah	Tahun (Milyar Rupiah)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Kerinci	85.85	110.36	139.67	214.48	235.12
Merangin	168.26	192.36	217.12	235.07	247.23
Sarolangun	141.83	149.65	171.83	204.86	216.14
Batanghari	138.62	160.37	182.30	250.44	263.21
Muaro Jambi	140.89	150.95	175.86	223.91	235.53
Tanjung Jabung Timur	92.90	107.86	129.37	139.57	151.59
Tanjung Jabung Barat	125.58	176.56	205.66	230.55	242.94
Tebo	116.98	130.23	155.55	160.80	163.15
Bungo	221.91	227.53	261.15	279.84	281.15
Kota Jambi	236.38	278.72	300.31	328.29	329.57
Kota Sungai Penuh	56.46	69.89	84.96	112.59	114.58
Provinsi Jambi	1525.66	1754.48	2023.78	2380.4	2480.21

Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa pengeluaran pemerintah bidang kesehatan di Provinsi jambi mengalami kenaikan setiap tahunnya. Kenaikan pengeluaran ini terjadi karena ingin memenuhi sarana dan prasarana kesehatan. Agar setiap masyarakat dapat menikmati pelayanan kesehatan yang telah tersedia.

3.6 Gambaran Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jambi

Tabel 3.6 Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jambi Periode 2017-2021

Wilayah	Tahun (Persen)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Kerinci	70.03	70.59	70.95	71.21	71.45
Merangin	68.30	68.81	69.07	69.19	69.53
Sarolangun	69.03	69.41	69.72	69.86	70.25
Batanghari	68.92	69.33	69.67	69.84	70.11
Muaro Jambi	67.86	68.34	69.01	69.18	69.55
Tanjung Jabung Timur	62.61	63.32	63.92	64.43	64.91
Tanjung Jabung Barat	66.15	67.13	67.54	67.54	68.16
Tebo	68.16	68.67	69.02	69.14	69.35
Bungo	69.04	69.42	69.86	69.92	70.15
Kota Jambi	76.74	77.41	78.26	78.37	79.12
Kota Sungai Penuh	73.75	74.67	75.36	75.42	75.70
Provinsi Jambi	69.99	70.65	71.26	71.29	71.63

Kemajuan pembangunan manusia secara umum dapat dilihat dengan perkembangan Indeks Pembangunan Manusia yang mencerminkan pencapaian kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Provinsi Jambi termasuk Kota yang telah berkembang pesat dengan kemajuan pembangunan di Provinsi Jambi pada saat ini terutama pada Indeks Pembangunan Manusianya (IPM). Indeks Pembangunan yang terjadi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang baik. Hal tersebut berarti kinerja pemerintah di kabupaten/kota Provinsi Jambi menunjukkan performa yang baik. Jadi Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jambi mengalami peningkatan setiap tahunnya.



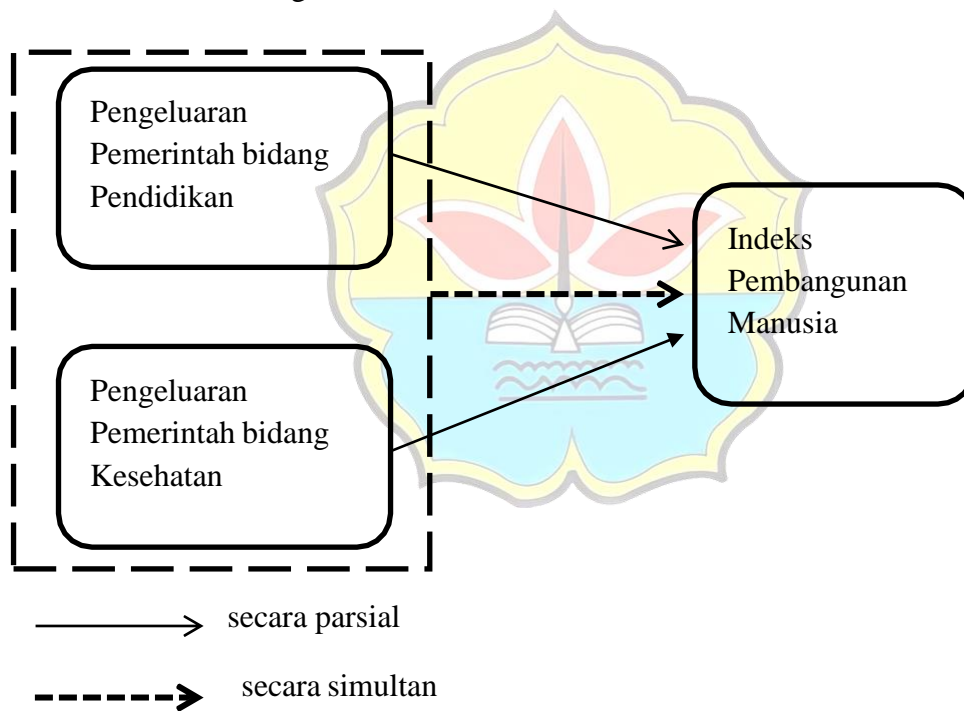
BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Permodelan Sub Struktural I

Adapun permodelan sub struktural I untuk menjawab permasalahan mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan bidang kesehatan secara simultan dan parsial terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jambi sebagai berikut:



4.1.1.1 Uji Spesifikasi Model

a. Uji Chow

Uji Chow merupakan uji yang dipakai untuk memutuskan model yang akan dipakai apakah menggunakan model *common effect* atau model *fixed effect*.

Hipotesis yang digunakan dalam uji Chow adalah:

H_0 : Common Effect

H_a : Fixed Effect

Jika hasil probabilitas chi-square tidak mencapai 5%, maka hipotesis ditolak. Oleh karena itu, model yang digunakan adalah *Fixed Effect*. Hasil dari uji chow sebagai berikut:

Tabel 4.1 Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	491.123853	(10,42)	0.0000
Cross-section Chi-square	262.357000	10	0.0000

Sumber: *output eviews 12*

Berdasarkan data diatas diperoleh nilai probabilitas ChiSquare sebesar $0,0000 < 0,05$ dalam hal ini H_0 ditolak dan H_a diterima. Jadi model *Fixed Effect* yang dipakai dalam penelitian ini.

b. Uji Hausman

Uji hausman adalah uji statistik yang digunakan untuk memilih model yang paling tepat antara model *fixed effect* atau *random effect*. Hipotesis uji hausman sebagai berikut :

H_0 : *Random Effect*

H_a : *Fixed Effect*

Penggunaan model *Random Effect*, jika hasil probabilitas Chi-Square lebih dari 5%, dan sebaliknya jika tidak mencapai dari 5% sebaiknya menggunakan *Fixed Effect*. Berikut hasil dari uji hausman:

Tabel 4.2 Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	0.795963	2	0.6717

Sumber: *output evIEWS 12*

Hasil probabilitas Chi-Square adalah 0.6717. Maka dapat disimpulkan H_0 diterima dan H_a ditolak, sehingga model yang digunakan adalah *Random Effect*.

c. Hasil Analisis Regresi Data Panel

Berdasarkan uji yang telah dilakukan dari hasil data panel di atas, maka menggunakan model *Random Effect* lebih baik dalam menginterpretasikan regresi data panel untuk menjawab penelitian ini.

Tabel 4.3 Hasil Analisis Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	67.33193	1.291149	52.14885	0.0000
X1	0.013560	0.002324	5.835694	0.0000
X2	0.000615	0.002700	0.227594	0.8209

Sumber: *output evIEWS 12*

Berdasarkan tabel diatas, maka diperoleh persamaan regresi data panel sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + b_1X_{1it} + b_2X_{2it} + e$$

$$Y_{it} = 67.33193 + 0.013560 X_{1it} + 0.000615 X_{2it}$$

1. Dapat dilihat dari persamaan regresi tersebut bahwa besar koefisien konstanta adalah 67.33193. Dengan demikian dapat diartikan bahwa jika seluruh variabel bebas memiliki nilai sama dengan satu (1) maka tingginya tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 67.33%.

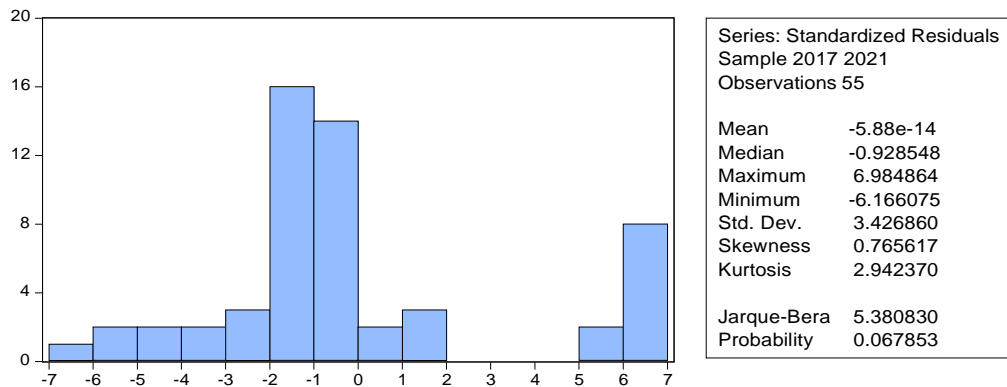
2. Koefisien regresi variabel pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan memiliki nilai sebesar 0.013560 dengan tanda positif. Artinya setiap penambahan per satu-satuan variabel pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan, maka tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan meningkat sebesar 0.13%.
3. Koefisien regresi variabel pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan memiliki nilai sebesar 0.000615 dengan tanda positif. Artinya setiap penambahan per satu-satuan variabel pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan, maka tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan meningkat sebesar 0.000615%.

4.1.1.2 Hasil Uji Asumsi Klasik

Pengujian hipotesis klasik adalah langkah yang penting dilakukan sebelum pengujian hipotesis. Ada empat uji asumsi klasik yang harus dipenuhi dalam menjadi model regresi yang baik, yaitu:

a. Uji Normalitas

Tujuan uji normalitas adalah untuk memeriksa apakah terdapat variabel pengganggu atau residual yang berdistribusi normal dalam model regresi. Membuat keputusan dengan tes Jargue-Bera atau tes JB, yaitu. jika probabilitasnya $> 5\%$, variabel-variabel ini berdistribusi normal.



Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan uji normalitas diatas, probabilitas sebesar 0.067853 menunjukkan bahwa probabilitas >0.05 . Sehingga dapat disimpulkan data tersebut berdistribusi normal.

b. Uji Heteroskedastisitas

Tujuan dari uji heteroskedastisitas adalah untuk menguji apakah suatu model regresi dari satu pengamatan residual ke pengamatan yang lain memiliki heteroskedastisitas. Hasil kontrol untuk residu log-kuadrat untuk semua variabel menunjukkan bahwa probabilitasnya lebih besar dari 0,05. Artinya model tidak heteroskedastis.

Tabel 4.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.945749	0.988929	2.978725	0.0044
X1	0.000713	0.002306	0.309117	0.7585
X2	-0.001627	0.002672	-0.608758	0.5453

Sumber: *output views 12*

Berdasarkan hasil uji pada tabel 5.4 diatas, diperoleh nilai probabilitas masing-masing variabel independen $>0,05$ maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

c. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji ada atau tidaknya korelasi antar variabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik harus menunjukkan tidak ada korelasi antara variabel independen. Jika variabel independen berkorelasi satu sama lain, variabel tersebut tidak organik. Variabel anorganik merupakan variabel bebas yang memiliki nilai korelasi nol (0) antar variabel bebas. Jika koefisien korelasi antar variabel independen lebih besar dari 0,80 maka model multikolinearitas dapat dihentikan. Di sisi lain, koefisien korelasi berada di bawah level 0,8 sehingga tidak terjadi multikolinieritas pada model.

Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinearitas

	X1	X2
X1	1.000000	0.655985
X2	0.655985	1.000000

Berdasarkan hasil output di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas karena nilai korelasi antar nilai independen kurang dari 0,80.

d. Uji Autokolerasi

Uji autokorelasi digunakan dengan tujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antara kesalahan perancu pada periode t dengan kesalahan perancu pada periode t-1 (sebelumnya) dalam model regresi linier. Untuk

mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dapat menggunakan uji Durbin-Watson (DW).

Tabel 4.6 Hasil Uji Autokorelasi

R-squared	0.157345	Mean dependent var	70.04455
Adjusted R-squared	0.124935	S.D. dependent var	3.630341
S.E. of regression	3.395998	Akaike info criterion	5.336074
Sum squared resid	599.7059	Schwarz criterion	5.445565
Log likelihood	-143.7420	Hannan-Quinn criter.	5.378415
F-statistic	4.854859	Durbin-Watson stat	0.243757
Prob(F-statistic)	0.011665		

Sumber: *output eviews 12*

Dari data diatas, hasil uji DW yang dilakukan diperoleh statistik Durbin-Watson sebesar 0,243757. Nilai dU diperoleh dengan tabel dW dengan ukuran sampel 55 (N) dan jumlah variabel bebas (K) 2, namun nilai dU yang dihasilkan adalah 1,6406, karena $dU < 4 - dW$ ($1,6406 < 3,756243$), dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi.

4.1.1.3 Pengujian Hipotesis

a. Uji Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji F)

Uji-F adalah pengujian untuk mengetahui apakah beberapa variabel bebas memiliki hubungan yang signifikan secara statistik yang mempengaruhi variabel terikat.

Tabel 4.7 Hasil Uji F

R-squared	0.689613	Mean dependent var	2.881558
Adjusted R-squared	0.677675	S.D. dependent var	0.605746
S.E. of regression	0.343904	Sum squared resid	6.150045
F-statistic	57.76640	Durbin-Watson stat	1.530161
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: *output eviews 12*

Berdasarkan hasil uji F diketahui bahwa nilai F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} ($57,766 > 3,18$) dan tingkat probabilitas (F-statistik) adalah 0,000000. H_0 ditolak dengan menggunakan taraf α 0,05 atau 5%. Dari sini dapat disimpulkan bahwa di Provinsi Jambi variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan variabel pengeluaran pemerintah bidang kesehatan mempunyai pengaruh secara simultan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

b. Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)

Uji regresi terpisah dilakukan untuk mengetahui apakah ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Berikut adalah data subtesnya:

Tabel 4.8 Hasil Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	67.33193	1.291149	52.14885	0.0000
X1	0.013560	0.002324	5.835694	0.0000
X2	0.000615	0.002700	0.227594	0.8209

Sumber: *output eviws 12*

Berdasarkan data di atas pengujian variabel pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan dan pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jambi tahun 2017-2021 menghasilkan:

- 1) Variabel X_1 pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jambi menunjukkan hasil nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($5.835694 > 0.67915$) dengan tingkat signifikansi (p-value) = 0.0000 (< 0.05). Karena nilai p-value $< \alpha$ (5%)

maka dengan demikian H_0 ditolak, yang berarti bahwa pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan berpengaruh dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jambi tahun 2017-2021.

- 2) Variabel X_2 pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jambi menunjukkan hasil nilai t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($0.227594 < 0.67915$) dengan tingkat signifikansi ($p\text{-value}$) = 0.8209 (> 0.05). Karena nilai $p\text{-value} > \alpha$ (5%) maka dengan demikian H_{a1} ditolak, yang berarti bahwa pengeluaran pemerintah pada bidang Kesehatan tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jambi tahun 2017-2021.

c. Koefisien Determinasi R^2

Tabel 4.9 Hasil Koefisien Determinasi

R-squared	0.689613	Mean dependent var	2.881558
Adjusted R-squared	0.677675	S.D. dependent var	0.605746
S.E. of regression	0.343904	Sum squared resid	6.150045
F-statistic	57.76640	Durbin-Watson stat	1.530161
Prob(F-statistic)	0.000000		

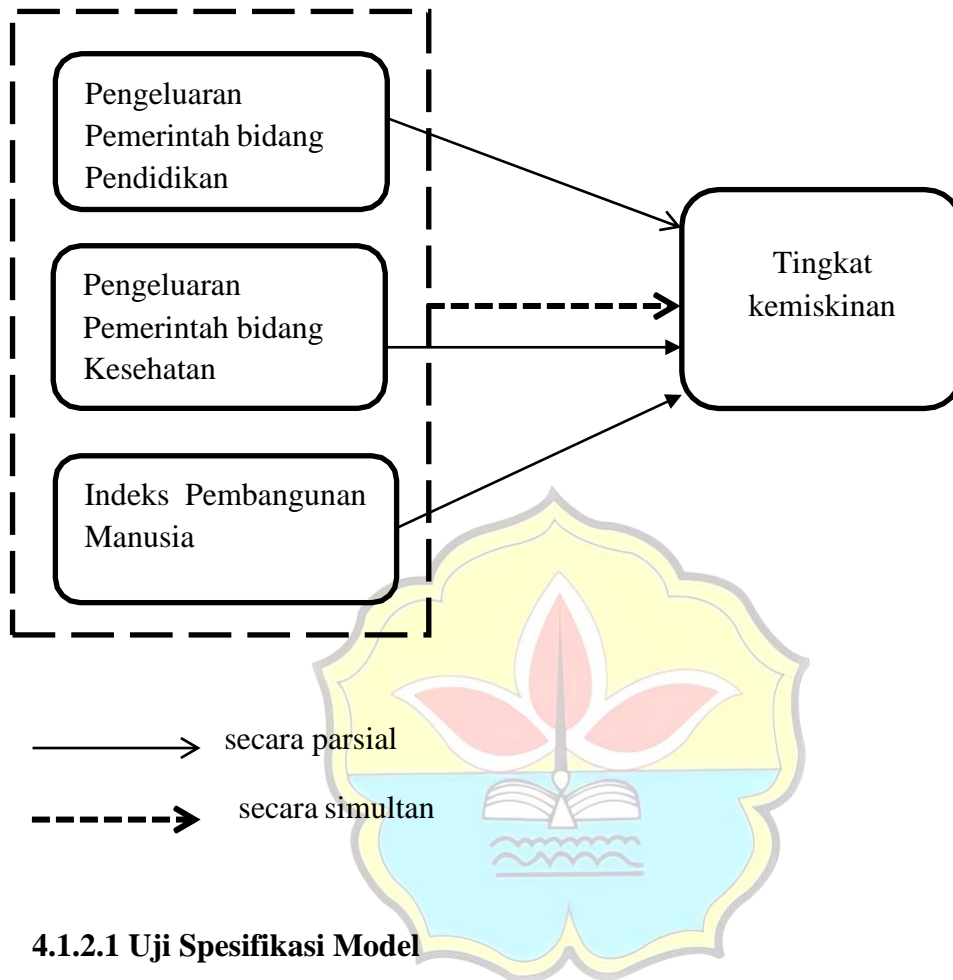
Sumber: *output views 12*

Koefisien determinasi atau faktor penyesuaian sebesar 0,677675. Artinya, kontribusi seluruh variabel independen terhadap penjelasan variabel dependen sebesar 67,76%. Selebihnya dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

4.1.2 Permodelan Sub Struktural II

Adapun permodelan sub struktural II untuk menjawab permasalahan mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, bidang kesehatan

dan Indeks Pembangunan Manusia secara simultan dan parsial terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi sebagai berikut:



4.1.2.1 Uji Spesifikasi Model

a. Uji Chow

Uji Chow merupakan uji yang dilakukan dengan tujuan untuk memutuskan model mana yang akan dipakai apakah model *common effect* atau model *fixed effect*. Hipotesis yang digunakan dalam pengujian ini adalah:

$$H_0 : \text{Common Effect}$$

$$H_a : \text{Fixed Effect}$$

Jika hasil probabilitas chi-square tidak mencapai 5%, maka hipotesis ditolak. Oleh karena itu, Model yang digunakan adalah *Fixed Effect*. Hasil dari uji chow sebagai berikut:

Tabel 4.10 Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	291.209646	(10,41)	0.0000
Cross-section Chi-square	235.237061	10	0.0000

Sumber: *output evIEWS 12*

Berdasarkan output diatas, menunjukkan bahwa nilai probabilitas ChiSquare adalah $0,0000 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Sehingga model yang digunakan adalah *Fixed Effect*.

b. Uji Hausman

Uji Hausman adalah uji statistik yang dipakai untuk menentukan mana model yang paling tepat antara model *fixed effect* atau model *random effect*. Uji Hausman dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : *Random Effect*

H_a : *Fixed Effect*

Jika hasil probabilitas Chi-Square lebih dari 5%, maka model yang digunakan sebaiknya model *Random Effect* dan sebaliknya jika tidak mencapai 5% maka menggunakan model *Fixed Effect*. Hasil dari uji hausman sebagai berikut:

Tabel 4.11 Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	12.838875	3	0.0050

Sumber: *output evIEWS 12*

Hasil probabilitas Chi-Square sebesar 0.0050. Dengan demikian H0 ditolak dan Ha diterima jadi dapat disimpulkan bahwa *Fixed Effect* yang sebaiknya digunakan.

c. Hasil Analisis Regresi Data Panel

Berdasarkan pengujian dari hasil data panel di atas, maka penggunaan model *Fixed Effect* lebih tepat dalam menginterpretasikan regresi data panel untuk menjawab penelitian ini.

Tabel 4.12 Hasil Analisis Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	48.70316	30.91817	1.575228	0.1229
X1	-0.005303	0.009267	-0.572219	0.5703
X2	0.018779	0.008073	2.326052	0.0250
Z	-0.404356	0.458548	-0.881819	0.3830

Sumber: *output evIEWS 12*

Berdasarkan tabel diatas, maka diperoleh persamaan regresi data panel sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + b_1 X_{1it} + b_2 X_{2it} + Z_{it} + e$$

$$Y_{it} = 48.70316 - 0.005303 + 0.018779 - 0.404356$$

1. Dapat dilihat dari persamaan regresi tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai koefisien konstanta adalah 48.70316. Artinya jika seluruh variabel bebas memiliki nilai sama dengan satu (1) maka tingginya tingkat kemiskinan sebesar 48.7031%.
2. Koefisien regresi variabel pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan memiliki nilai sebesar 0.005303 dengan tanda negatif. Artinya setiap penambahan per satu-satuan variabel pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan, maka tingkat kemiskinan akan berkurang sebesar 0.005%.

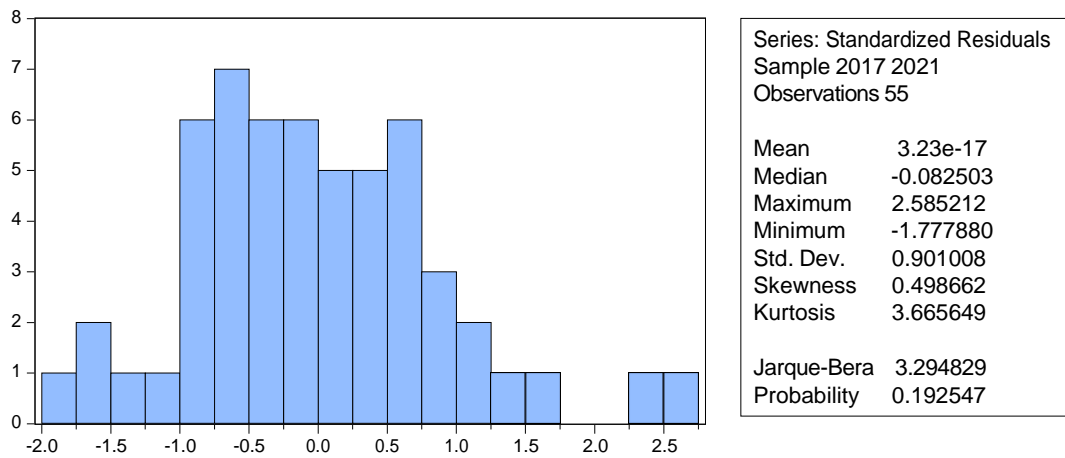
3. Koefisien regresi variabel pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan memiliki nilai sebesar 0.018779 dengan tanda positif. Artinya setiap penambahan per satu-satuan variabel pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan, maka tingkat kemiskinan akan meningkat sebesar 0.018779%.
4. Koefisien regresi variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki nilai sebesar 0.404356 dengan tanda negatif. Artinya setiap penambahan per satu-satuan variable Indeks Pembangunan Manusia (IPM), maka tingkat kemiskinan akan berkurang sebesar sebesar 0.40%.

4.1.2.2 Hasil Uji Asumsi Klasik

Dalam menguji hipotesis perlu dilakukan pengujian yang dinamakan uji asumsi klasik. Ada empat uji asumsi klasik yang harus dipenuhi untuk bisa menjadi model regresi yang baik, yaitu:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dipakai dengan tujuan untuk menguji apakah variabel pengganggu atau residual dalam model regresi berdistribusi normal. Pengambilan keputusan dengan menggunakan uji Jargue-Bera test atau uji J-B test. Artinya, variabel-variabel tersebut berdistribusi normal jika probabilitasnya lebih besar dari 5%.



Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan uji normalitas diatas, probabilitas adalah 0.192547 yang berarti probabilitas >0.05 . Maka dapat disimpulkan data tersebut berdistribusi normal.

b. Uji Heteroskedastisitas

Tujuan dari uji heteroskedastisitas adalah untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain dalam suatu model regresi. Hasil regresi dari kuadrat sisa logaritma semua variabel menunjukkan probabilitas lebih besar dari 0,05. Artinya model tidak heteroskedastis.

Tabel 4.13 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-22.53191	14.25202	-1.580963	0.1216
X1	-0.007152	0.004272	-1.674100	0.1017
X2	0.008489	0.003722	2.281118	0.0778
Z	0.309749	0.211372	1.465421	0.1504

Sumber: *output views 12*

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 5.13 diatas, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas karena nilai probabilitas masing-masing variabel independen $>0,05$.

c. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah suatu model regresi berkorelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak berkorelasi antar variabel independen. Variabel tidak organik jika variabel independen saling berkorelasi. Variabel anorganik merupakan variabel bebas yang memiliki nilai korelasi nol (0) antar variabel bebas. Jika koefisien korelasi antar variabel bebas lebih besar dari 0,80, maka dapat disimpulkan bahwa model tersebut multikolinear. Sebaliknya, koefisien korelasinya lebih kecil dari 0,8, sehingga model tidak multikolinier.

Tabel 4.14 Hasil Uji Multikolinearitas

	X1	X2	Z
X1	1.000000	0.855985	0.845248
X2	0.855985	1.000000	0.894548
Z	0.845248	0.894548	1.000000

Berdasarkan hasil output di atas dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolienaritas karena diperoleh nilai kolerasi antar independen kurang dari 0,80.

d. Uji Autokolerasi

Uji autokorelasi dipakai dengan tujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antara kesalahan palsu pada periode t dengan kesalahan palsu pada periode t-1 (sebelumnya) dalam model regresi linier. Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dapat menggunakan uji Durbin-Watson (DW).

Tabel 4.15 Hasil Uji Autokorelasi

R-squared	0.584722	Mean dependent var	25.71327
Adjusted R-squared	0.560294	S.D. dependent var	11.86605
S.E. of regression	7.868417	Akaike info criterion	7.033538
Sum squared resid	3157.511	Schwarz criterion	7.179526
Log likelihood	-189.4223	Hannan-Quinn criter.	7.089993
F-statistic	23.93641	Durbin-Watson stat	0.588888
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: *output eviews 12*

Dari hasil uji DW yang dilakukan diperoleh hasil statistik Durbin-Watson sebesar 0,588888. Oleh karena itu, nilai dU diperoleh tabel dW dengan jumlah sampel (N) sebanyak 55 dan jumlah variabel bebas (K) sebanyak 2, namun nilai dU adalah 1,6406 dan $dU < 4-dw$ ($1,6406 < 3,411112$) dapat dikatakan bahwa tidak ada autokorelasi.

4.1.2.3 Pengujian Hipotesis

a. Uji Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji F)

Uji-F adalah uji yang dipakai dengan tujuan untuk menentukan apakah terdapat hubungan yang signifikan secara statistik antara beberapa variabel independen dengan variabel dependen.

Tabel 4.16 Hasil Uji F

R-squared	0.994234	Mean dependent var	25.71327
Adjusted R-squared	0.992406	S.D. dependent var	11.86605
S.E. of regression	1.034031	Akaike info criterion	3.120137
Sum squared resid	43.83804	Schwarz criterion	3.631094
Log likelihood	-71.80376	Hannan-Quinn criter.	3.317728
F-statistic	543.8560	Durbin-Watson stat	1.775689
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: *output eviews 12*

Berdasarkan hasil uji F terlihat bahwa nilai Fhitung lebih besar dari Ftabel ($543,8560 > 3,18$) pada taraf probabilitas (F-statistik) 0,000000. H_0 ditolak dengan menggunakan taraf α 0,05 atau 5%. Dari data tersebut

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara simultan variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap angka kemiskinan di Provinsi Jambi.

b. Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)

Uji regresi terpisah dipakai dengan tujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Berikut adalah hasil subtesnya:

Tabel 4.17 Hasil Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	48.70316	30.91817	1.575228	0.1229
X1	-0.005303	0.009267	-0.572219	0.5703
X2	0.018779	0.008073	2.326052	0.0250
Z	-0.404356	0.458548	-0.881819	0.3830

Sumber: *output eviews 12*

Berdasarkan data di atas pengujian variabel pengeluaran pemerintah pada bidang Pendidikan, pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi tahun 2017-2021 menghasilkan:

- 1) Variabel X_1 pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi menunjukkan hasil nilai t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($-0.572219 < 0.67915$) dengan tingkat signifikansi (p-value) = 0.5703 (> 0.05). Karena nilai p-value $> \alpha$ (5%) maka dengan demikian H_0 ditolak, yang berarti bahwa variabel pengeluaran pemerintah pada

bidang pendidikan tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi tahun 2017-2021.

- 2) Variabel X_2 pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi menunjukkan hasil nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($2.326052 < 0.67915$) dengan tingkat signifikansi (p-value) = $0.0250 (< 0.05)$. Karena nilai p-value $< \alpha$ (5%) maka dengan demikian H_0 ditolak, yang berarti bahwa pengeluaran pemerintah pada bidang Kesehatan tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi tahun 2017-2021.
- 3) Variabel Z Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi menunjukkan hasil nilai t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($-0.881819 < 0.67915$) dengan tingkat signifikansi (p-value) = $0.3830 (> 0.05)$. Karena nilai p-value $> \alpha$ (5%) maka dengan demikian H_0 ditolak, yang berarti bahwa variabel Indeks Pembangunan Manusia tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi tahun 2017-2021.

c. Koefisien Determinasi R^2

Tabel 4.18 Hasil Koefisien Determinasi

R-squared	0.994234	Mean dependent var	25.71327
Adjusted R-squared	0.992406	S.D. dependent var	11.86605
S.E. of regression	1.034031	Akaike info criterion	3.120137
Sum squared resid	43.83804	Schwarz criterion	3.631094
Log likelihood	-71.80376	Hannan-Quinn criter.	3.317728
F-statistic	543.8560	Durbin-Watson stat	1.775689
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: *output eviews 12*

Koefisien determinasi atau *goodness of fit* adalah 0,992406. Artinya, kontribusi seluruh variabel independen terhadap penjelasan variabel dependen sebesar 99,24%. Selebihnya dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

4.2 Analisis dan Pembahasan

Setelah didapatkan hasil dari uji hipotesis regresi, berikut pembahasan dalam penelitian ini:

1. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Bidang Kesehatan Secara Simultan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jambi

Berdasarkan hasil uji F menunjukkan bahwa nilai F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} ($57.76640 > 3.18$) dengan tingkat Prob (F-Statistic) sebesar 0.000000. Dengan menggunakan tingkat α 0.05 atau 5% maka H_0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh secara simultan variabel pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan dan pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jambi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Chotimah (2019) yang menunjukkan hasil bahwa variabel bebas pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di wilayah Kabupaten-Kabupaten di Provinsi Jawa Timur Bagian Selatan. Pada penelitian Julio (2019) menunjukkan hasil bahwa variabel Pendidikan dan Kesehatan berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Wilayah Bakorwil V Provinsi Jawa Timur. Pada

penelitian Hidayati (2022) hasilnya menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah sektor Pendidikan dan kesehatan berpengaruh secara bersama-sama terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi D.I. Yogyakarta.

2. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Bidang Pendidikan dan Bidang Kesehatan Secara Parsial Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jambi

Berdasarkan hasil penelitian pengaruh pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jambi menunjukkan hasil nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($5.835694 > 0.67915$) dengan tingkat signifikansi (p-value) = 0.0000 (< 0.05). Karena nilai p-value $< \alpha$ (5%) maka dengan demikian H_0 ditolak, yang berarti bahwa pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan berpengaruh dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jambi tahun 2017-2021.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Prasetio (2018) bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pengeluaran pemerintah bidang Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Mongan (2019) yang menunjukkan hasil bahwa pengeluaran belanja pemerintah pusat dalam pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia. Penelitian Atdjar (2018) menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Timur.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan, seperti sumber daya manusia dan teknologi, berdampak signifikan terhadap IPM. Karena ketika lebih banyak siswa yang terdidik dan memiliki keterampilan yang lebih baik, pemerintah pasti akan meningkatkan kualitas pendidikan. Hal ini memberikan dampak positif bagi pembangunan ekonomi negara dan kemajuan kehidupan.

Berdasarkan hasil penelitian pengaruh pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jambi menunjukkan hasil nilai t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($0.227594 < 0.67915$) dengan tingkat signifikansi (p-value) = 0.8209 (> 0.05). Karena nilai p-value $> \alpha$ (5%) maka dengan demikian H_0 ditolak, yang berarti bahwa pengeluaran pemerintah pada bidang Kesehatan tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jambi tahun 2017-2021.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Pake (2018) yang menunjukkan hasil pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan memiliki tanda positif dan berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Halmahera Utara. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Hidayati (2022) menunjukkan hasil bahwa Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan tidak signifikan indeks pembangunan manusia di provinsi Yogyakarta.

3. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan dan Indeks Pembangunan Manusia Secara Simultan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jambi

Berdasarkan hasil uji F terlihat bahwa nilai F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} ($543.8560 > 3.18$) dengan tingkat Prob (F-Statistic) sebesar 0.000000. Dengan menggunakan tingkat α 0.05 atau 5% maka H_0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh secara simultan variabel pengeluaran pemerintah pada bidang Pendidikan, pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Hadiyanti (2021) yang menunjukkan hasil bahwa ada pengaruh variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang Kesehatan dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap tingkat kemiskinan

4. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan dan Indeks Pembangunan Manusia Secara Parsial Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jambi

Berdasarkan hasil penelitian pengaruh pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi menunjukkan hasil nilai t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($-0.572219 < 0.67915$) dengan tingkat signifikansi (p-value) = 0.5703 (> 0.05). Karena nilai p-value $> \alpha$ (5%) maka dengan demikian H_{a1} ditolak, yang berarti bahwa variabel

pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi tahun 2017-2021.

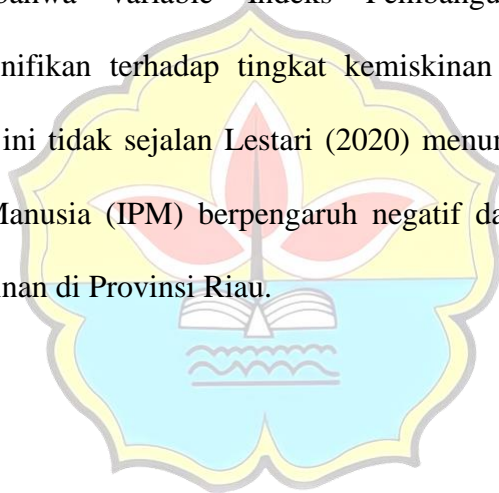
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Fithri (2019) hasil Penelitian menunjukkan bahwa pengaruh pengeluaran pemerintah disektor pendidikan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Sari (2018) hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan infrastruktur berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan. Penelitian Noviyanti (2018) menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan

Berdasarkan hasil penelitian pengaruh pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi menunjukkan hasil nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($2.326052 < 0.67915$) dengan tingkat signifikansi ($p\text{-value}$) = $0.0250 (< 0.05)$. Karena nilai $p\text{-value} < \alpha$ (5%) maka dengan demikian H_0 ditolak, yang berarti bahwa pengeluaran pemerintah pada bidang Kesehatan tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi tahun 2017-2021.

Hasil penelitian Aini (2020) hasil penelitian ini memiliki hasil bahwa pengeluaran pemerintah sektor kesehatan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Fithri (2019) hasil menunjukkan pengeluaran pemerintah disektor kesehatan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan.

Berdasarkan hasil penelitian pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi menunjukkan hasil nilai t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($-0.881819 < 0.67915$) dengan tingkat signifikansi ($p\text{-value}$) = 0.3830 (> 0.05). Karena nilai $p\text{-value} > \alpha$ (5%) maka dengan demikian H_0 ditolak, yang berarti bahwa variabel Indeks Pembangunan Manusia tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi tahun 2017-2021.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Harman (2022) yang menunjukkan bahwa variable Indeks Pembangunan Manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Bone. Hasil penelitian ini tidak sejalan Lestari (2020) menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Riau.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

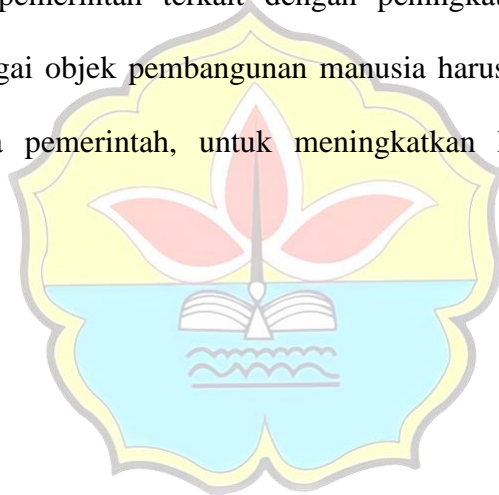
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan berpengaruh dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jambi tahun 2017-2021. Sedangkan variabel pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jambi tahun 2017-2021
2. Variabel pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan dan bidang kesehatan berpengaruh dan signifikan secara simultan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jambi tahun 2017-2021.
3. Variabel pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan, variabel pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan dan variabel indeks pembangunan manusia tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi tahun 2017-2021.
4. Variabel pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan, bidang kesehatan dan variabel indeks pembangunan manusia berpengaruh dan signifikan secara simultan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi tahun 2017-2021.

5.2 Saran

Dari berbagai kesimpulan di atas, ada beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan.

1. Mengingat besarnya pengaruh belanja pemerintah sektor pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jambi, diharapkan pemerintah provinsi Lampung mampu meningkatkan realisasi belanja pemerintah sektor pendidikan.
2. Masyarakat harus dapat mendorong dan mendukung segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan peningkatan kualitas manusia. Masyarakat sebagai objek pembangunan manusia harus mandiri, tidak selalu bergantung pada pemerintah, untuk meningkatkan kualitas hidup setiap individu.



DAFTAR PUSTAKA

- Aditia, Ngakan Made Agung dan Dewi, Ni Putu Martini. 2018. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Ekonomi Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Bali*. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana Vol.7, No 2 Februari 2018.
- Adi Widodo, dkk 2011 "Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di bidang pendidikan dan bidang kesehatan terhadap Pengentasan Kemiskinan melalui Peningkatan Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah". FEB Universitas Diponegoro Semarang.
- Atdjar, R. 2018. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawrman* vol 3 (4)
- Badan Keuangan Kota Jambi (2017-2021). *Data anggran pendidikan dan anggaran kesehatan*
- Chotimah, K. 2019. Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Serta Gini Ratio Terhadap Indeks Pembangunan Manusaia di Kabupaten-Kabupaten di Provinsi Jawa Timur Bagian Selatan. *Jurnal Ilmiah* . Universitas Brawijaya
- BPS, 2017-2021, *Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Dalam Angka*. Provinsi Jambi.
- BPS. 2007. *Data dan Indeks Pembangunan Manusia*.
- BPS Kota Jambi.
- Bps.go.id Jambi
- Cliff Laisina, dkk, 2015. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan dan Bidang Kesehatan Terhadap PDRB Melalui Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Utara tahun 2002-2013*. FEB Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Daryanto, Arief & Hafizrianda, Yundy. 2010. *Model-Model Kuantitatif Untuk Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Bogor: PT Penerbit IPB Press.
- Daryanto. 1996. *Kependudukan*. Bandung: Tarsito.

- Delavallade, Clara. 2006. Corruption and Distribution of Public Spending in Developing Countries. *Journal of Economics and Finance*.30(2): pp: 222-239.
- Djaenuri, Aries. 2012. *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah*. Jakarta: Indonesia. Ghalia
- Feriyanto,Nur. 2014. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Fithri, N. 2019. Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol 15 (2)
- Handayani, Rahmita, 2015. *Analisis Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau*. Fakultas Ekonomi Universitas Riau. Riau.
- Herman, H. 2022. Efek Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*. Vol 19 (2)
- Hidayati, D. R. 2022. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan, Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Ekonomi Manajemen dan akuntansi* 24 (4)
- Jhingan. 2003. *Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Julio, D. S. A. 2019. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Investasi Swasta terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Wilayah Bakorwil V Provinsi Jawa Timur. *Skripsi*. Epository Universitas Jember.
- Lanjouw Petter,dkk."Poverty Education and Helth in Indonesia : Who Benefits From Public Spending ". World Bank Discussion Paper No 339, Washington.2001.
- Lestari, D. D. 2020. Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Riau. *Skripsi*. Universitas Islam Riau
- Mangkoesebroto, Guritno, 2002. *Ekonomi Publik, Edisi 3*. Yogyakarta: BPFE.
- Mangkoesebroto, Guritno, 2008. *Ekonomi Publik*. Edisi 3. BPFE, Yogyakarta.
- Dumairy, 1996. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.

- Merang Kahang, dkk, 2016, "*Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kutai Timur*". Skripsi. Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman. Indonesia.
- Mongan, J. J. S. 2019. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. *Jurnal Perbendaharaan, keuangan negara dan kebijakan public* vol 4 nomor 2.
- Noviyanti, E. 2019. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan Terhadap Kemiskinn Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia di Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Skripsi*. Universitas Negeri Jakarta.
- Osinubi TS. 2005. *Urban Poverty In Nigeria : A Case Study Of Agege Area of Lagos State, Nigeria*. www.gdnet.org/fulltext/osinubi.pdf diakses pada 11 oktober 2018 pada 13.30WIB.
- Pake, S. D. S. 2018. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Bidang Pendidikan dan Kesehatan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 18 (4)
- Prasetio, T. W. 2018. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung Dalam Prespektif Ekonomi Islam. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Raden Intan: Lampung.
- Putera, Adi Dwi, 2015 . "*Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dibidang Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung*". FEB Universitas Lampung.
- Putra, Adi Dwi, 2015. "*Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Bidang pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung*". FEB Universitas Lampung.
- Republik Indoesesia, Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang pendidikan.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Maqin, Abdul, 2007. *Indeks Pembangunan Manusia Tinjauan Teoritis Empiris di Jawa Barat*. FE Universitas Pasundan . Sumedang.

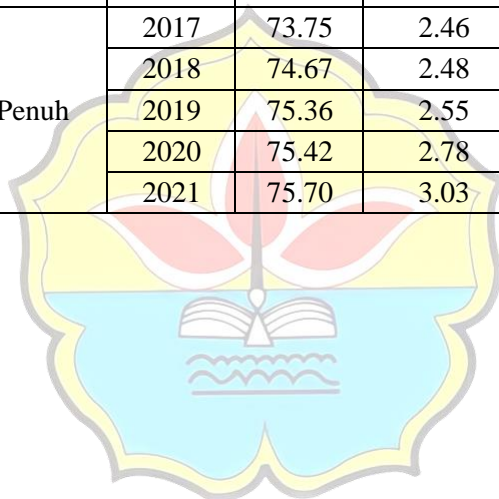
- Sahrah, Alimartus. 2007. *Memberdayakan Sumber Daya Manusia Untuk Meningkatkan Kualitas Bangsa*. Pidato Dies Natalis Unwama ke XXI, Yogyakarta.
- Sari, P. I. 2018. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Infrastruktur Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Universitas Sriwijaya
- Suartha, Nyoman. 2013. *Pengaruh Kapasitas Rumah Tangga, Budaya, dan Pemberdayaan Terhadap Sikap Serta Keberdayaan Rumah Tangga Miskin*.
- Sukirno, Sadono, 2000. *Makro Ekonomi Modern*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, Sadono. 2004. *Makroekonomi Modern*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Todaro, Michael. 2003. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Edisi ke-7 (Terjemahan Bahasa Indonesia). Jakarta. PT Erlangga
- UNDP, 1990. *Human Development Report*. Oxford Univesrsity Press. New York.
- UNDP, 1996. *Economic Growth and Human Development*. Oxford University Press. New York.
- Usmaliadanti, S. 2011. *Analisis Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indkes Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa tengah Tahun 2007-2009*.
- Wahid, Bila. A. 2012. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Pertumbuhan Ekonomi*. Makassar.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Mentah Penelitian

NO	Wilayah	Tahun	Z	Y	X1	X2
1	Kerinci	2017	70.03	17.62	217.50	85.85
		2018	70.59	16.76	209.17	110.36
		2019	70.95	17.00	294.58	139.67
		2020	71.21	17.48	336.90	214.48
		2021	71.45	18.45	345.51	235.12
2	Merangin	2017	68.30	35.48	395.98	168.26
		2018	68.81	33.95	378.38	192.36
		2019	69.07	32.88	416.22	217.12
		2020	69.19	33.92	404.77	235.07
		2021	69.53	35.44	406.78	247.23
3	Sarolangun	2017	69.03	25.61	311.75	141.83
		2018	69.41	25.70	313.87	149.65
		2019	69.72	25.39	362.50	171.83
		2020	69.86	25.79	374.39	204.86
		2021	70.25	27.06	386.41	216.14
4	Batanghari	2017	68.92	27.49	324.61	138.62
		2018	69.33	27.55	320.00	160.37
		2019	69.67	26.53	348.05	182.30
		2020	69.84	26.54	365.23	250.44
		2021	70.11	27.24	367.12	263.21
5	Muaro Jambi	2017	67.86	18.28	317.96	140.89
		2018	68.34	17.38	374.95	150.95
		2019	69.01	16.86	417.08	175.86
		2020	69.18	17.30	405.17	223.91
		2021	69.55	20.49	406.52	235.53
6	Tanjung Jabung Timur	2017	62.61	27.22	300.08	92.90
		2018	63.32	26.99	303.85	107.86
		2019	63.92	25.35	305.10	129.37
		2020	64.43	24.23	306.06	139.57
		2021	64.91	24.42	308.15	151.59
7	Tanjung Jabung Barat	2017	66.15	36.33	254.08	125.58
		2018	67.13	36.28	296.06	176.56
		2019	67.54	35.12	303.49	205.66
		2020	67.54	34.78	354.27	230.55
		2021	68.16	36.10	357.38	242.94

8	Tebo	2017	68.16	23.18	277.22	116.98
		2018	68.67	22.86	289.64	130.23
		2019	69.02	22.83	304.48	155.55
		2020	69.14	22.47	316.42	160.80
		2021	69.35	23.77	324.26	163.15
9	Bungo	2017	69.04	20.81	332.69	221.91
		2018	69.42	21.11	343.39	227.53
		2019	69.86	20.87	337.03	261.15
		2020	69.92	22.07	384.91	279.84
		2021	70.15	23.64	398.23	281.15
10	Kota Jambi	2017	76.74	52.08	458.59	236.38
		2018	77.41	50.61	442.59	278.72
		2019	78.26	48.95	451.74	300.31
		2020	78.37	50.44	501.57	328.29
		2021	79.12	54.23	543.87	329.57
11	Kota Sungai Penuh	2017	73.75	2.46	163.53	56.46
		2018	74.67	2.48	171.29	69.89
		2019	75.36	2.55	180.56	84.96
		2020	75.42	2.78	186.26	112.59
		2021	75.70	3.03	191.36	114.58



Lampiran 2. Data Hasil Penelitian

1. Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	491.123853	(10,42)	0.0000
Cross-section Chi-square	262.357000	10	0.0000

Sumber: *output evIEWS 12*

2. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	0.795963	2	0.6717

Sumber: *output evIEWS 12*

3. Hasil Analisis Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	67.33193	1.291149	52.14885	0.0000
X1	0.013560	0.002324	5.835694	0.0000
X2	0.000615	0.002700	0.227594	0.8209

Sumber: *output evIEWS 12*

4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.945749	0.988929	2.978725	0.0044
X1	0.000713	0.002306	0.309117	0.7585
X2	-0.001627	0.002672	-0.608758	0.5453

Sumber: *output evIEWS 12*

5. Hasil Uji Multikolinearitas

	X1	X2
X1	1.000000	0.655985
X2	0.655985	1.000000

6. Hasil Uji Autokorelasi

R-squared	0.157345	Mean dependent var	70.04455
Adjusted R-squared	0.124935	S.D. dependent var	3.630341
S.E. of regression	3.395998	Akaike info criterion	5.336074
Sum squared resid	599.7059	Schwarz criterion	5.445565
Log likelihood	-143.7420	Hannan-Quinn criter.	5.378415
F-statistic	4.854859	Durbin-Watson stat	0.243757
Prob(F-statistic)	0.011665		

Sumber: *output views 12*

7. Hasil Uji F

R-squared	0.689613	Mean dependent var	2.881558
Adjusted R-squared	0.677675	S.D. dependent var	0.605746
S.E. of regression	0.343904	Sum squared resid	6.150045
F-statistic	57.76640	Durbin-Watson stat	1.530161
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: *output views 12*

8. Hasil Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	67.33193	1.291149	52.14885	0.0000
X1	0.013560	0.002324	5.835694	0.0000
X2	0.000615	0.002700	0.227594	0.8209

Sumber: *output views 12*

9. Hasil Koefisien Determinasi

R-squared	0.689613	Mean dependent var	2.881558
Adjusted R-squared	0.677675	S.D. dependent var	0.605746
S.E. of regression	0.343904	Sum squared resid	6.150045
F-statistic	57.76640	Durbin-Watson stat	1.530161
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: *output eviews 12*

10. Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	291.209646	(10,41)	0.0000
Cross-section Chi-square	235.237061	10	0.0000

Sumber: *output eviews 12*

11. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	12.838875	3	0.0050

Sumber: *output eviews 12*

12. Hasil Analisis Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	48.70316	30.91817	1.575228	0.1229
X1	-0.005303	0.009267	-0.572219	0.5703
X2	0.018779	0.008073	2.326052	0.0250
Z	-0.404356	0.458548	-0.881819	0.3830

Sumber: *output eviews 12*

13. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-22.53191	14.25202	-1.580963	0.1216
X1	-0.007152	0.004272	-1.674100	0.1017
X2	0.008489	0.003722	2.281118	0.0778
Z	0.309749	0.211372	1.465421	0.1504

Sumber: *output views 12*

14. Hasil Uji Multikolinearitas

	X1	X2	Z
X1	1.000000	0.855985	0.845248
X2	0.855985	1.000000	0.894548
Z	0.845248	0.894548	1.000000

15. Hasil Uji Autokorelasi

R-squared	0.584722	Mean dependent var	25.71327
Adjusted R-squared	0.560294	S.D. dependent var	11.86605
S.E. of regression	7.868417	Akaike info criterion	7.033538
Sum squared resid	3157.511	Schwarz criterion	7.179526
Log likelihood	-189.4223	Hannan-Quinn criter.	7.089993
F-statistic	23.93641	Durbin-Watson stat	0.588888
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: *output views 12*

16. Hasil Uji F

R-squared	0.994234	Mean dependent var	25.71327
Adjusted R-squared	0.992406	S.D. dependent var	11.86605
S.E. of regression	1.034031	Akaike info criterion	3.120137
Sum squared resid	43.83804	Schwarz criterion	3.631094
Log likelihood	-71.80376	Hannan-Quinn criter.	3.317728
F-statistic	543.8560	Durbin-Watson stat	1.775689
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: *output views 12*

17. Hasil Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	48.70316	30.91817	1.575228	0.1229
X1	-0.005303	0.009267	-0.572219	0.5703
X2	0.018779	0.008073	2.326052	0.0250
Z	-0.404356	0.458548	-0.881819	0.3830

Sumber: *output eviews 12*

18. Hasil Koefisien Determinasi

R-squared	0.994234	Mean dependent var	25.71327
Adjusted R-squared	0.992406	S.D. dependent var	11.86605
S.E. of regression	1.034031	Akaike info criterion	3.120137
Sum squared resid	43.83804	Schwarz criterion	3.631094
Log likelihood	-71.80376	Hannan-Quinn criter.	3.317728
F-statistic	543.8560	Durbin-Watson stat	1.775689
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: *output eviews 12*

